

**LAPORAN TAHUNAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2013**

**BADAN KETAHANAN PANGAN  
2014**

---



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2013 selesai disusun sesuai yg direncanakan.

Laporan tahunan ini menjelaskan tentang pencapaian program dan kegiatan Badan Ketahanan Pangan tahun 2013 yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010 -2014. Adapun isi dari laporan tahunan ini terdiri dari situasi Badan Ketahanan Pangan tahun 2013, kebijakan pembangunan ketahanan pangan, capaian target utama peningkatan diversifikasi pangan, kinerja program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat serta penutup saran tindak lanjut.

Pada era reformasi birokrasi saat ini peran Badan Ketahanan Pangan sangat sebagai institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan sangat strategis dalam mewujudkan komitmen tersebut, BKP terus berbenah diri dengan: a) peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan, b) pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional, c) pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah, d) peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, e). serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yg telah memberikan masukan dan saran-saran serta berperan aktif dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan sangat dijadikan sebagai evaluasi agar kinerja BKP semakin lebih baik.

Jakarta, Maret 2014

Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Achmad Suryana



**LAPORAN TAHUNAN  
BADAN KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2013**

**BADAN KETAHANAN PANGAN  
2014**

**BAB I**  
**SITUASI 2012**

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa dalam meneggakan eksistensi dan kedaulatannya, oleh karenanya perwujudan ketahanan pangan harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengartikan ketahanan pangan sebagai *“kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau”*. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut dalam mewujudkannya *“ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat”*.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Upaya untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan kemudian menjabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.

Laporan yang disajikan ini merupakan gambaran umum tentang situasi dan capaian program kegiatan ketahanan selama tahun anggaran 2013, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penyempurnaan ke arah yg lebih baik dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.

### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan**

Dalam melaksanakan perannya Badan Ketahanan Pangan, memiliki TUPOKSI sebagai berikut :

- a) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
- b) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan.
- c) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan panganekaragaman pangan.
- d) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar.
- e) pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

### **1.2. Struktur organisasi.**

Organisasi BKP didukung 4 Eselon II:

- a) Sekretariat Badan, bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKP Kementerian Pertanian;
- b) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, bertugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

- c) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, bertugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan.
- d) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bertugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan, serta pengawasan keamanan pangan segar.

### 1.3 Dukungan Sumberdaya Manusia

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia aparat yang tersedia. Jumlah pegawai tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012, yaitu 322 ke jumlah 304 pegawai. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang meninggal, pensiun, dan mutasi namun tidak ada penambahan CPNS.

#### 1) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Pendidikan

Pegawai Badan Ketahanan Pangan memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat pendidikan terendah (SD) hingga tertinggi (S3). Sebanyak 119 atau 39,14 persen pegawai memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) dan sebanyak 7 atau 2,30 persen pegawai telah menempuh pendidikan Doktor (S3).

Tabel I.2 Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012 dan 2013

Uraian	Jumlah Pegawai Pertahun	
	Tahun 2012	Tahun 2013
<b>1. Tingkat Pendidikan</b>	<b>322</b>	<b>304</b>
(a) SLTA kebawah	109	103
(b) Sarjana Muda dan D-3	10	10
(c) Sarjana Strata 1 dan D4	138	119
(d) Strata-2 Magister	57	65

Uraian	Jumlah Pegawai Pertahun	
	Tahun 2012	Tahun 2013
(e) Strata-3 Doktor	8	7
<b>2. Kepangkatan</b>	<b>322</b>	<b>304</b>
(a) Golongan I	3	2
(b) Golongan II	37	33
(c) Golongan III	251	241
(d) Golongan IV	31	28
<b>3. Usia Pegawai</b>	<b>322</b>	<b>304</b>
(a) Kurang dari 26 tahun	7	0
(b) 26 – 35 tahun	109	96
(c) 36 – 45 tahun	68	78
(d) 46 – 50 tahun	56	47
(e) Lebih dari 51 tahun	82	83

2) Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Pegawai Badan Ketahanan Pangan mempunyai golongan yang bervariasi dari Golongan I sampai dengan Golongan IV. Sebanyak 241 atau 79,27 persen pegawai termasuk kedalam Golongan III. Sementara itu, sebanyak 161 atau 52,96 persen pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 143 atau 47,03 persen pegawai berjenis kelamin perempuan. seperti disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel I.3 Jumlah Pegawai BKP Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Tahun	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Laki-laki	2	2	26	25	126	120	16	14	170	161
2	Perempuan	1	-	11	8	125	121	15	14	152	143
	Jumlah	3	2	37	33	251	241	31	28	322	304

3) Jumlah Pegawai menurut Fungsional

Badan Ketahanan Pangan memiliki jabatan fungsional khusus yaitu: (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) Muda; (2) Pranata Komputer Muda; (3) Statistisi Penyelia; (4) PMHP Pertama; (5) Pranata Komputer Pertama; (6) Statistisi Pertama. Badan ketahanan pangan memiliki 9 pegawai dengan jabatan fungsional, dimana jumlah jabatan fungsional terbanyak adalah Statistisi pertama yaitu 3 pegawai (33,33 persen) yang mengemban tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan dan analisis data serta pengembangan metode statistik. Adapun Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2012 dan 2013 Tabel I.4 pada lampiran.

4) Jumlah Pegawai CPNS

Awal tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan tidak menerima pegawai CPNS secara umum karena masih dalam moratorium.

5) Jumlah Pegawai Pensiun

Sampai dengan bulan Desember 2013 terdapat 19 pegawai Badan Ketahanan Pangan yang pensiun. Sebanyak 10 Pegawai (52,63 persen dari total pegawai pensiun) yang pensiun berada pada Golongan III dan selebihnya 9 pegawai (4,36 persen) dari golongan IV.

Tabel I.5 Jumlah pegawai Badan Ketahanan Pangan yang pensiun Tahun 2012 dan 2013

No	Unit Kerja	Golongan III		Golongan IV		Jumlah	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	4	3	4	5	8	8
2	Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	2	2	-	3	2
3	Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan	1	5	1	-	2	5
4	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	4	4	4	4
	Jumlah	6	10	11	9	17	19

1.4. Dukungan dan perkembangan Anggaran

Alokasi anggaran dari : a) tahun 2009 ke 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,61 milyar; b) tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu sebesar 231,27 milyar; c) tahun 2011 ke 2012 mengalami kenaikan sebesar 58,59 milyar; dan d) tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan sebesar 40,39 milyar. Naik turunnya alokasi anggaran disebabkan oleh : perubahan kebijakan prioritas Kementerian Pertanian, serta naik atau turunnya kelompok penerima sasaran yaitu : Kawasan/Desa Mandiri Pangan, KRPL, Lumbung Pangan Masyarakat, dan LDPM.

Dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, pada awal TA. 2013 Badan Ketahanan Pangan (BKP) beserta lembaga ketahanan pangan di propinsi dan kabupaten/kota memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 692,070 milyar. Tetapi pada tahun berjalan terjadi penghematan pagu anggaran sebesar Rp. 30,73 milyar untuk subsidi BBM, dan penambahan anggaran untuk Direktif Presiden sebesar Rp. 13,58 milyar, sehingga pagu akhir anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 647.16 milyar. Direktif Presiden untuk kegiatan KRPL di provinsi NTT dengan sasaran 400 kelompok di 5 kabupaten/kota yaitu TTU, TTS, Alor, Kupang, dan Kota Kupang. Jumlah alokasi anggaran tersebut turun Rp. 40,39 milyar atau 5,87 persen dibanding alokasi tahun 2012 sebesar Rp. 687,55 milyar. Alokasi penurunan anggaran tersebut di tingkat pusat sebesar Rp. 0,58 milyar atau 0,084 %; dan di tingkat daerah sebesar Rp. 39,81 milyar atau 5,79 % (**Tabel 16**).

Seluruh anggaran 2013 dialokasikan dalam 170 satker berupa : (a) Dana Sentralisasi di Pusat Rp. 75,29 milyar atau 11,63 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 propinsi Rp. 392,73 milyar atau 60,68 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan Propinsi dan Kabupaten/kota sebesar Rp. 179,14 milyar atau 27,68 persen. Untuk kabupaten/kota yang tidak berdiri sendiri, anggarannya masuk dalam provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Sedangkan untuk alokasi anggaran per kegiatan utama pada tahun 2013 sebelum dan sesudah penghematan adalah sebagai berikut (**tabel 17**). Sedangkan realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut (**tabel 18**).

Belum optimalnya penyerapan anggaran lingkup BKP antara lain disebabkan oleh: (1) Keterlambatan penerbitan SK Pengelola Keuangan baik di provinsi (Gubernur) dan TP (Menteri Pertanian), (2) Adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan sulitnya bagi propinsi untuk melakukan pembinaan atau pengawasan dalam penggunaan dana TP di kabupaten, sehingga terkadang propinsi terkesan lepas tangan dalam hal pembinaan penggunaan anggaran khususnya dana bansos; atau kabupaten/kota beranggapan bahwa tidak perlu ada laporan pertanggung jawaban terhadap provinsi; (2) Pergantian pejabat (kepemimpinan) dan pelaksana kegiatan ketahanan pangan, serta bentuk kelembagaan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan anggaran dan terjadinya beberapa revisi anggaran; (3) Pemahaman petugas administrasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan masih kurang dan kreativitasnya juga masih kurang (sangat tergantung dari arahan pusat); (4) Keterbatasan sarana dan prasarana, serta banyaknya satker yang ditangani khususnya di tingkat provinsi (kab/kota melalui dana dekonentrasi) menyebabkan kesulitan dalam menyusun dan menyampaikan laporan; (5) Adanya perubahan kode MAK di pertengahan tahun sehingga terjadi hambatan yang dialami oleh beberapa kabupaten dalam melakukan revisi MAK, sehingga tidak dapat segera mencairkan anggaran untuk kegiatan; dan (6) Adanya penghematan di pertengahan tahun anggaran.

Anggaran yang digunakan tidak seluruhnya dilaporkan dalam laporan ini karena LAKIP bukan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan, tetapi lebih kepada laporan pertanggungjawaban kinerja. Dengan demikian, anggaran yang tercantum pada laporan ini hanya anggaran program dan kegiatan strategis Badan Ketahanan Pangan lingkup Pusat dan Daerah.

LAKIP Badan Ketahanan Pangan disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dengan Menteri Pertanian.

Alokasi anggaran Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 647,160 milyar yang digunakan untuk melaksanakan empat kegiatan utama dengan sasaran kegiatan yang terdapat dalam laporan ini dengan rincian yaitu: (a) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (b) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan; (c) Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan; dan (d) Dukungan manajemen teknis lainnya.

### **1.5. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan sumberdaya penunjang dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan, Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berdaya guna akan memudahkan SDM Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan. Inventarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Badan Ketahanan Pangan salah satunya dengan melaporkan SIMAK BMN.

Berdasarkan laporan posisi Barang Milik Negara pada neraca tahun 2013 sarana dan prasarana Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 22.843.883.210. Nilai barang tersebut meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan hewan tanaman untuk dijual atau diserahkan pada masyarakat, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan masyarakat, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, sebagaimana **Tabel ....** terlampir.

### **1.6. Prestasi Yang Telah Diraih**

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan tugas secara insidental/diluar rencana berdasarkan perintah pimpinan serta kebijakan lainnya yang dianggap penting. Kegiatan tersebut lebih banyak bersifat koordinasi atau dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan intansi terkait baik di dalam maupun luar Kementerian Pertanian; serta di tingkat Internasional yang dikoordinasikan oleh FAO, WFP, maupun forum lainnya. Beberapa prestasi kinerja Badan Ketahanan Pangan,

serta apresiasi dari masyarakat, pemerintah daerah, dan tingkat internasional kepada Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah, seperti :

1. Kegiatan One Day No Rice di seluruh daerah dengan menerapkan one day no rice atau perubahan pemanfaatan substitusi pangan dari umbi-umbian.
2. Penghargaan internasional dari **The Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)** kepada Badan Ketahanan Pangan tentang program pengembangan untuk keamanan pangan tahun 2012. Namun penghargaan tersebut ditetapkan pada Februari 2013.
3. Penyerahan berkas AFTERR berupa hibah. Penyelesaian Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Sepanjang tahun 2012 Badan Ketahanan Pangan mendapatkan kunjungan dari DPRD daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tentang program ketahanan pangan. Pada umumnya membahas program dan kegiatan, kelembagaan, dan dukungan instansi terkait.
5. Badan Ketahanan Pangan mendapatkan penghargaan sebagai Tim Satlak SPI terbaik kedua, serta seluruh Eselon II lingkup BKP mendapatkan penghargaan wilayah bebas dari korupsi.
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan juga mendapatkan penghargaan sebagai tokoh anti korupsi Kementerian Pertanian.

#### 1.7. Hambatan Tahun 2012

Pelaksanaan kegiatan dan program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2013 tidak terlepas dari permasalahan, kendala, dan hambatan yang dialami pada tahun 2012. Hambatan tersebut menjadi bahan perbaikan bagi Badan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Berikut ini adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan program Badan Ketahanan Pangan tahun 2012:

1. Aspek pembangunan ketahanan pangan yang mencakup subsistem ketersediaan dan kerawanan pangan, subsistem distribusi pangan, subsistem konsumsi dan keamanan pangan, cukup luas dan terkait

dengan berbagai sektor serta subsektor, sehingga memerlukan kebijakan yang cukup kompleks, terpadu, dan terkoordinasi mulai dari pusat hingga kabupaten/kota.

2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 dan 41 Tahun 2007, bahwa Ketahanan Pangan menjadi urusan wajib di daerah. Namun, beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota belum membentuk Lembaga Ketahanan Pangan. Bagi daerah yang telah membentuk lembaga ketahanan pangan, sebagian besar masih tergabung dengan unit kerja lain, akibatnya program dan kegiatan yang telah direncanakan setiap tahun tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan kegiatan yang ditugaskan dari pusat ke daerah cukup banyak, sedangkan jumlah SDM yang tersedia cukup terbatas.
3. Pelaksana kegiatan atau struktur organisasi kelembagaan ketahanan pangan di daerah sering berubah akibat terjadinya perubahan kepemimpinan, sehingga DIPA daerah harus revisi, pencairan, dan penggunaan anggaran menjadi terhambat, dan akhir pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target dan sasaran yang diharapkan.
4. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang disepakati belum sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah.
5. Terjadinya bencana alam yang beruntun, mengakibatkan focus kegiatan menjadi berubah, terutama dalam penanganan bencana alam di daerah, dan disisi lain cadangan pangan daerah belum berkembang dan belum tertata dengan baik. Di sisi lain, penanganan daerah awan pangan berdasarkan analisis SKPG belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pemahaman aparat pelaksana bahwa dana PDRP dapat dicairkan jika analisis SKPG dilakukan dengan baik.
6. Pedoman umum tidak segera diimplementasikan oleh provinsi dan kabupaten/kota ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis), sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan menjadi lamban dan kurang sinkron.

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

#### 2.1. VISI

Mengacu visi, arah, dan kebijakan pembangunan pertanian, maka Visi BKP Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 "***menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan***". ***Handal*** berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. ***Aspiratif*** berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. ***Inovatif*** berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. ***Pemantapan Ketahanan Pangan*** adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

#### 2.2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka disusun Misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam tahun 2010-2014 sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
- b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
- c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
- d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

#### 2.3. TUJUAN

Seiring visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan, potensi, dan peluang, disusun tujuan pembangunan ketahanan

---

pangan Tahun 2010-2014, memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
- b. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
- c. Mengembangkan sistem distribusi, harga, dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
- d. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
- e. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

#### **2.4. SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis Badan Ketahanan Pangan, disusunlah sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 - 2014 yang hendak dicapai, terdiri dari:

- a. Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilo kalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
- b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
- c. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
- d. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;

- e. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
- f. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.
- g. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
- h. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

## **2.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran strategis ketahanan pangan tersebut, ditempuh melalui strategi, kebijakan, program, kegiatan yang masih mengacu pada tahun sebelumnya sebagai berikut:

### **A. Strategi**

Strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan yaitu :

- a. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
- b. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;
- c. Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar;
- d. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan masyarakat;
- e. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
- f. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Implementasi dari Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, dilaksanakan melalui :

- a. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan;
- b. Pemantapan sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan;
- c. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- d. Penajaman keamanan pangan segar; dan
- e. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, melalui : (a) Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi); (b) Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah; (c) Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (d) Memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan; dan (e) Meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.
- b. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, melalui : (a) Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat; (b) Mengembangkan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung; dan (c) Memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan serta daya beli masyarakat.
- c. Percepatan penganeekaragaman konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui : (a) Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; (c) Menumbuhkan dan mengembangkan industri

pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); (d) Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat; dan (e) Pengawasan keamanan pangan segar.

- d. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui : (a) Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor; (b) Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat; (c) Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan; (d) Peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; (e) Pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan; dan (f) Efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk menopang berbagai strategi tersebut, diperlukan strategi penunjang yang tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi BKP, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, peduli, transparan, dan bebas KKN.
- b. Meningkatkan koordinasi perencanaan ketahanan pangan.
- c. Merumuskan produk hukum bidang ketahanan pangan yg berpihak kepada petani.
- d. Membangun sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif.
- e. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penanganan ketahanan pangan.

## **B. Kebijakan**

Kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang bersifat umum dan strategis tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Badan Ketahanan Pangan, tetapi menyebar di berbagai subsektor lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya. Beberapa kebijakan yang berada dalam kewenangan dan penanganan dari BKP antara lain:

- a. Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, diarahkan untuk: (i) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (ii) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.
- b. Peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakannya diarahkan untuk : (i) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (ii) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (iv) Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, antara lain: (i) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; (ii) Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; (iii) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar; dan (iv) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, antara lain: (i) Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (ii) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (iii) Meningkatkan peranan kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain : (i) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerja sama internasional; (iii) Peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

### C. PROGRAM

Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2013, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai program pembangunan pertanian yang mengacu pada program pembangunan tahun 2010-2014 yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, sasaran (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Adapun indikator sasaran program (outcome) yaitu: (1) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun; (2) Peningkatan diversifikasi/ penganekaragaman konsumsi pangan dengan pencapaian skor PPH menjadi 93,3 untuk tahun 2014; (3) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun sebesar 1,5 persen; serta (4) Pengembangan lembaga distribusi masyarakat pada tahun 2014 menjadi 1.750 gapoktan, 2.000 lumbung dan 17 cadangan pangan pemerintah (propinsi) untuk menjaga kestabilan pangan pokok.

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu :

- a. **Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**, sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

- b. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan,** sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan.
- c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar,** sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.
- d. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan,** dengan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan administrasi dan manajemen terhadap penyelenggaran ketahanan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan; (b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi, yang diarahkan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan ini tidak dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak dapat mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan.

### BAB III

#### CAPAIAN TARGET UTAMA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN

Peningkatan Diversifikasi Pangan merupakan salah satu target Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014, karena terwujudnya pembangunan ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui penurunan konsumsi beras; peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, dan sayur-sayuran; serta peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

#### 3.1 KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Dalam periode 2009 - 2013, perkembangan agregat konsumsi pangan menunjukkan fluktuasi dimana terjadi penurunan maupun kenaikan, konsumsi energi perkapita perhari pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan serta konsumsi protein perkapita perhari tahun 2011 dan 2012 juga menunjukkan hal yang sama. Mengacu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan BPS menunjukkan, bahwa konsumsi penduduk Indonesia pada periode 2009 – 2013 mengalami sedikit penurunan, untuk: energi turun rata-rata 0,75 persen dan protein turun 0,57 persen pertahun, walaupun konsumsi energi dalam 2 tahun terakhir dan konsumsi protein 3 tahun pertama mengalami kenaikan, seperti dalam **tabel 1**.

Konsumsi pangan selama tahun 2011 - 2013 bersifat fluktuatif dan cenderung turun. Konsumsi energi perkapita perhari pada tahun 2007 mencapai 2,015 kilo kalori meningkat menjadi 2,038 kilokalori tahun 2008, turun menjadi 1,927 dan 1,926 tahun 2009 dan 2010, tetapi pada tahun 2011 naik menjadi 1,952. Demikian juga untuk konsumsi protein perkapita perhari, pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan, tetapi naik pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 56,25. Selama periode 2007 - 2011, konsumsi perkapita perhari untuk energi pada tahun 2009, 2010, dan 2011 berada di bawah angka kecukupan yang dianjurkan WKNPG VIII tahun 2004 sebesar 2,000 kkal, tetapi konsumsi protein sudah berada diatas angka kecukupan yang dianjurkan sebesar 52 gram perkapita perhari.

Pada tahun 2013, terjadi perbaikan perhitungan angka skor PPH yang telah menyesuaikan dengan data konsumsi ikan dari publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta perubahan pengeluaran sayur dan buah dari Ditjen Hortikultura. Berdasarkan hasil justifikasi data susenas, walaupun ada peningkatan skor PPH Nasional tahun 2013 sebesar 88,2 tetapi masih belum mencapai target PPH menurut Renstra Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 – 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 yaitu 91,5.

**Tabel I. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan protein serta Nilai PPH Tahun 2009 – 2013**

Konsumsi PPH	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	1964	1968	2005	1912	1937
Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	58.8	60.0	61.9	60.3	61.7
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79.4	82.3	84.6	83.9	88.9

*Sumber data : Susenas BPS, diolah kembali oleh BKP Kementerian Pertanian, dengan mempertimbangkan konsumsi ikan dan penyesuaian konsumsi sayuran dan buah-buahan berdasarkan proporsi pendapatan.*

Dari sisi komposisi keragaman konsumsi energi kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE), masih didominasi kelompok pangan bersumber dari padi-padian diatas 60 persen, lebih besar dari proporsi ideal 50 persen, dan konsumsi umbi-umbian 2-3 persen kurang dari proporsi ideal 6 persen, seperti dalam **Tabel 2** di bawah ini.

**Tabel 2. Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan  
Tahun 2011-2013**

Kelompok Pangan	2011		2012		2013		Anjuran	
	Energi	% AKG	Energi	%AKG	Energi	%AKG	Energi	% AKG
a. Padi-padian	1.236	61,8	1.167	58,4	1.177	58,9	1.000	50,0
b. Umbi-umbian	53	2,7	40	2,0	38	1,9	120	6,0
c. Pangan hewani	168	8,4	165	8,3	157	7,9	240	12,0
d. Minyak dan lemak	204	10,2	212	10,6	205	10,3	200	10,0
e. Buah/biji berminyak	33	1,7	30	1,5	27	1,4	60	3,0
f. Kacang-kacangan	56	2,8	54	2,7	53	2,7	100	5,0
g. Gula	81	4,1	70	3,5	72	3,6	100	5,0
h. Sayur dan buah	97	4,9	97	4,9	117	5,9	120	6,0
i. Lain-lain	39	2,0	35	1,8	38	1,9	60	3,0
<b>Total</b>	<b>2.005</b>	<b>100,3</b>	<b>1.912</b>	<b>95,6</b>	<b>1.937</b>	<b>96,9</b>	<b>2000</b>	<b>100</b>
<b>Skor PPH</b>	<b>84,6</b>		<b>83,9</b>		<b>88,9</b>		<b>100</b>	

*Sumber data : Susenas BPS 2011 – 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian*

Berdasarkan data di atas, konsumsi padi – padian, minyak dan lemak sudah melampaui anjuran, tetapi umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan buah belum memenuhi komposisi konsumsi ideal anjuran. Secara nasional, kualitas/keragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor PPH mengalami fluktuasi dari 84,6 pada tahun 2011 menjadi 83,9 pada tahun 2012 kemudian naik menjadi 88,9 pada tahun 2013. Oleh karena itu untuk meningkatkan hal tersebut diperlukan : 1) peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengonsumsi pangan B2SA melalui KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu serta penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik); 2) Penyediaan sayuran & buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses

oleh seluruh keluarga merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH).

Berbeda dengan skor pola pangan harapan, indikator penurunan konsumsi beras menunjukkan kondisi yang semakin baik dan mencapai target 1,5 persen per tahun. Berdasarkan data sasaran BPS pada tahun 2012 turun sebesar 5,33 persen dibandingkan tahun 2011. Sedangkan untuk tahun 2013 angka konsumsi beras Indonesia pada tahun 2013 sebesar 97,36 kg/kapita. Angka ini menunjukkan penurunan konsumsi beras nasional sebesar 0,24 kg/kapita atau 0,2% dibandingkan tahun 2012.

Upaya penurunan konsumsi beras ini dilakukan melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal yang diimplementasikan melalui kegiatan, antara lain: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Penyuluhan kepada siswa SD/MI, dan (4) Sosialisasi dan Promosi.

Kedepan penurunan konsumsi beras perlu introduksi komponen kegiatan di dalam dan luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, buah dan sayur. Selain itu, kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, terutama karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan kerja sama usaha kelompok. Kegiatan promosi untuk meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan sudah menunjukkan pengaruh langsung terhadap penurunan konsumsi beras, hal ini sudah dapat dilihat dari perilaku konsumsi pangannya yang sudah beragam.

Dari aspek keamanan pangan, kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan

budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia.

Dalam aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut, yaitu: (a) ketidakamanan pangan yang disebabkan adanya residu pestisida pada berbagai jenis hasil pertanian terutama pada sayuran, buah, dan pangan segar lainnya; (b) perilaku produsen pangan segar yang menggunakan zat pengawet, zat pewarna, dan zat pemanis buatan yang tidak sesuai ketentuan; serta (c) perilaku konsumen yang sebagian besar masih belum mengonsumsi pangan yang aman. Tiga hal tersebut dapat menimbulkan keracunan pada makanan, bahkan dapat menjadi salah satu penyebab Penyakit Bawaan Makanan/PBM (*food borne diseases*) bagi konsumen, karena: cemaran racun kimia atau toxin, logam berat, dan bahan kimia lainnya, serta cemaran mikroba dari bakteri, jamur, parasit, dan virus.

Kasus keracunan pangan yang melanda masyarakat, biasanya disebabkan oleh kontaminasi pada berbagai jenis pangan segar diantaranya oleh: (a) bahan kimia berupa residu pestisida (biasanya digunakan untuk pemberantasan hama dan penyakit dan sebagian masih tertinggal pada tanaman yang melebihi ambang batas yang ditetapkan untuk kesehatan manusia), residu obat hewan, logam berat (Hg, Pb, dan Cd), *aflatoxin*, bahan tambahan pangan yang berlebihan dan berbahaya; (b) cemaran biologis yang berasal dari mikroba bakteri, kapang, *khamir*, *protozoa*, dan *virus*.

Dalam rangka peningkatan penanganan pangan segar, Badan Ketahanan Pangan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah: (a) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar; (b) Pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan (c) Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar baik di pusat maupun daerah (provinsi atau kab/kota).

### **3.2. STABILISASI HARGA PANGAN**

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilnya harga pangan

---

sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan. Berikut perkembangan rata-rata harga pangan nasional per komoditi tahun 2013 dapat dilihat pada **tabel 3** di bawah ini.

**Tabel 3. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2013**

No	Komoditas	Rerata (Rp/kg)	CV (%)	Max	Min
1	Beras Umum	10,855	1.31	11,047	10,646
2	Beras Termurah	8,583	1.12	8,712	8,429
3	Daging Ayam	29,767	9.74	34,782	26,800
4	Daging Sapi	92,737	2.55	97,986	89,495
5	Gula Pasir	11,890	0.69	11,964	11,690
6	Cabe Merah	33,591	19.62	43,881	25,556
7	Cabe Rawit	30,810	28.75	49,113	21,762
8	Bawang Merah	36,396	32.02	55,881	20,881
9	Bawang Putih	21,665	40.03	43,069	14,554
10	Kedelai	9,592	5.31	10,357	9,160
11	Migor Curah	13,225	5.10	14,633	12,649
12	Migor Kemasan	12,848	0.77	13,002	12,719
13	Telur Ayam	17,650	6.95	19,746	16,172

Sumber : Data BPS diolah oleh BKP, kecuali jagung dari Kemendag. \*) Data sementara s.d. Mg-II Desember 2013

Berdasarkan data di atas, perkembangan harga komoditas pangan selama tahun 2013, terjadi kenaikan harga realif kecil pada komoditi seperti

beras, jagung, daging sapi, daging ayam dan telur. Kenaikan harga tertinggi terdapat pada 4 komoditas yang mengalami gejolak harga (CV >10%), yaitu cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih. Sementara untuk harga komoditas yang mengalami penurunan harga seperti gula dan bawang putih.

Khusus untuk harga beras selama periode 2009 – 2013 kondisinya lebih stabil dengan capaian Indikator Coefisien Varian (CV) sebesar 3,35, seperti pada **tabel 4** dibawah ini.

**Tabel 4. Capaian Indikator Coefisien Varian (CV) Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Coefisien Varian (CV) Komoditi Beras	
	Umum (%)	Termurah (%)
2009	1,29	0,96
2010	7,22	8,57
2011	5,83	6,76
2012	1,09	1,06

Keterangan : Data Desember 2013 masih angka sementara, - Sumber : BPS, diolah BKP

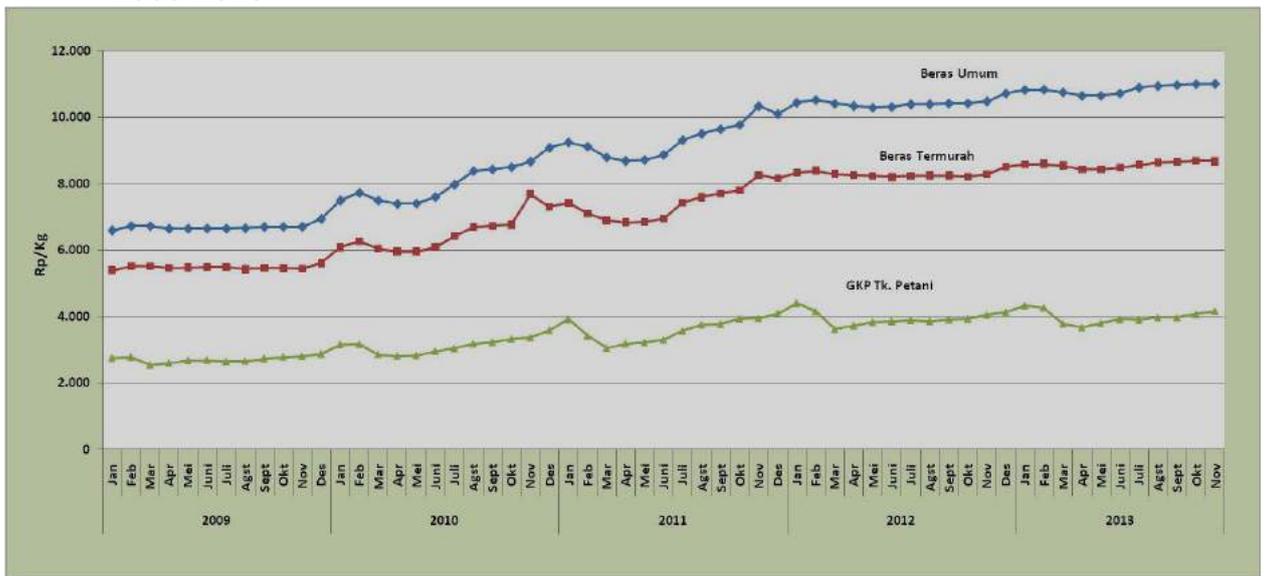
Perkembangan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bila dilihat berdasarkan **grafik 1** di bawah, harga GKP dan GKG pada November-Januari pada setiap tahunnya cenderung naik karena sedang musim tanam (paceklik).

**Grafik 1. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani dan GKG di Tingkat Penggilingan Tahun 2009 – 2013**



Sementara itu, bila dilihat dari **grafik 2** perkembangan harga GKP di tingkat Petani dan beras eceran selama 5 tahun terakhir, pola pergerakan harga beras lebih besar (0,91%) daripada harga GKP (0,84%), sedangkan harga beras periode November s.d. Januari cenderung naik.

**Grafik Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani dan Beras Eceran Th. 2009-2013**



Sumber : BPS, diolah BKP

### 3.3. PERKEMBANGAN KERAWANAN PANGAN

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan (rawan ketahanan pangan) yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) jangka waktu/periode kejadian dengan katagori *kronis* untuk jangka panjang dan *transien* untuk jangka pendek/fluktuasi, Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,000, Jika konsumsi perkapita: kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90

persen dari AKG termasuk katagori tahan pangan. Berikut perkembangan jumlah penduduk yang rentan terhadap rawan pangan, seperti tertera pada **tabel 5** di bawah ini.

**Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2010–2013**

Rincian	2011	2012	2013	Pertumbuhan (%/Tahun)
a. Jumlah Penduduk Sangat Rawan <sup>a)</sup> :				
1. Jumlah (juta Jiwa)	42,08	47,65	47,02	5,96
2. Persentase	17,41	19,46	19,04	4,81
b. Jumlah Penduduk Rawan <sup>b)</sup> :				
1. Jumlah (juta Jiwa)	78,49	80,58	83,65	3,23
2. Persentase	32,48	32,91	33,87	2,12
c. Jumlah Penduduk Tahan Pangan <sup>c)</sup> :				
1. Jumlah (juta Jiwa)	121,01	116,61	116,31	-1,95
2. Persentase	50,10	47,63	47,09	-3,03

Sumber data: BPS tahun 2011 - 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian, Catatan: (a) Konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG; (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG; dan (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG,

Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering, musim ombak besar, dan sebagainya, penduduk dan daerah yang rawan tersebut, perlu ditangani secara komprehensif sebagai upaya antisipasi timbulnya kasus kerawanan pangan.

Jumlah penduduk yang: (a) sangat rawan pangan pada tahun 2011 sekitar 42,08 juta bertambah menjadi 47,65 juta pada tahun 2012, pada tahun 2013 bertambah menjadi 47,02 juta; (b) rawan pangan pada tahun 2011 mencapai 78,49 juta, bertambah menjadi 80,58 juta pada tahun 2012, dan bertambah lagi menjadi 83,65 juta pada tahun 2013; sedangkan (c) penduduk tahan pangan pada tahun 2011 sebanyak 121,01 juta, menurun menjadi 116,61 juta pada

tahun 2012, pada tahun 2011 berkurang menjadi 116,31 juta. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari jumlah penduduk yang tahan pangan menjadi tidak tahan pangan.

Badan Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi rawan pangan, yaitu dengan melakukan Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Program tersebut telah memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kerawanan pangan, antara lain :

- a. Kasus kekurangan pangan pokok secara agregat menurun sebesar 10,7 % dari 39,8 % menjadi 29,0 %. Penurunan kasus kekurangan pangan pokok ini terjadi lebih cepat di luar Jawa (12,69 %) dibandingkan di Jawa (3,4 %).
- b. Adanya peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat sebesar 7,9%.
- c. Indikator rawan pangan, yaitu berat badan balita di bawah berat standar secara agregat juga mengalami penurunan signifikan dari 9 % menjadi 4,5 %.
- d. Secara agregat, rumah tangga keluarga dengan katagori “sangat miskin” dan “miskin” menurun secara signifikan. Akselerasi penurunan terjadi lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa.

#### **3.4. UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, masih diwarnai dengan berbagai permasalahan pangan. Pada tataran global, ketersediaan pangan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk dunia merupakan ancaman yang serius bagi ketahanan pangan nasional. Kebutuhan pangan dunia dalam 4 dekade mendatang, dengan populasi global yang diperkirakan akan mencapai 9 milyar, maka untuk mencukupi pangan bagi seluruh penduduk tersebut, perlu tambahan produksi pangan sekitar 70% dari kondisi yang ada saat ini.

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh bangsa Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, dapat menjadi ancaman yang besar dalam penyediaan pangan nasional, karena permintaan pangan akan

meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Dinamika permintaan, menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dalam jumlah, mutu, keragaman jenis, dan keamanan.

Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional terkendala karena adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam, serta penerapan teknologi belum optimal. Apabila tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan dapat mengganggu neraca pangan nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal, penyediaan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan SDM yang memadai.

Masalah ketahanan pangan juga dikaitkan dengan masih tinggi jumlah penduduk miskin sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan nasional.

Pada aspek Distribusi Pangan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah berfluktuasinya harga pangan sehingga berpotensi memicu kenaikan harga pangan dalam negeri, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan.

Pada aspek konsumsi pangan, sebagian besar kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, salah satunya adalah faktor kemiskinan.

Selain itu, berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah.

Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan berbagai kegiatan strategis, diantaranya adalah :

- a. Program Aksi Desa Mandiri Pangan, dengan sasaran daerah rawan pangan, tujuannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat miskin agar mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya.
  - b. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)
  - c. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), kegiatan ini difokuskan pada daerah sentra produksi pangan (beras dan jagung) untuk mencegah terjadinya jatuhnya harga beras/jagung pada saat panen raya.
  - d. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.
  - e. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang bergizi berimbang dan aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - f. Penanganan Keamanan Pangan Segar, dan
  - g. Pemantauan harga pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- .



**BAB IV**  
**CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN**  
**PANGAN MASYARAKAT**

Program dan kegiatan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peran serta dukungan instansi terkait sesuai dengan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders*/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2013 merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, dengan program-program aksinya sebagai berikut :

- a. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Promosi; (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; serta (3) Promosi dan Sosialisasi P2KP. Kegiatan tersebut juga didukung konsumsi pangan

yang aman melalui kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan pangan segar.

- b. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, yaitu : (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); (2) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat; (3) Pengendalian Kondisi Harga Pangan Pokok; serta (4) Pengembangan Model pemantauan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan.
- c. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu : (1) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan di Wilayah Perbatasan, Kepulauan, Papua dan Papua Barat, (2) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, (3) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (4) Penyusunan FSVA; dan (5) Analisis Ketersediaan Pangan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM).

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di daerah yang diarahkan untuk : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; (3) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan; serta (4) pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkarya dalam pembangunan ketahanan pangan.

Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, dengan program aksinya adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/*Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)* dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga”. Program aksi tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di 14 Kabupaten pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Fokus pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2013 adalah mempercepat pencapaian “Peningkatan Diversifikasi Pangan” sebagai salah satu dari empat kunci sukses pembangunan pertanian tahun 2010-2014.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2013, menunjukkan penyerapan realisasi anggaran sebesar 93,66 atau Rp. 606.112.604.135 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 647.159.931.000. Penyerapan anggaran tertinggi berdasarkan per kegiatan adalah Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar sebesar 96,37 persen. Sedangkan penyerapan dengan realisasi terendah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya sebesar 85,29 persen. Rendah penyerapan anggaran disebabkan karena adanya kegiatan project SOLID, dimana penyerapan PHLN sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 6. Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2013**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	(%)
1.	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	83.318.628.000	77.534.237.267	92,60
2.	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	88.009.540.000	82.534.895.267	93,78
3.	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	339.637.956.000	329.151.639.082	96,91
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	136.193.807.000	117.272.832.057	86,11
	T o t a l	647.159.931.000	606.112.604.135	93,66

Sumber : SAU dan PMK 249/2011

#### **4.1. PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN**

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan diarahkan untuk mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau serta mengurangi jumlah penduduk rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dibagi dalam 5 subkegiatan yang meliputi : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan); (2) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (3) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Provinsi; (4) Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan; serta (5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Desa dan Kawasan Mandiri Pangan.

Pendampingan desa mandiri pangan masih dilanjutkan pelaksanaannya pada Kawasan Mandiri Pangan di daerah perbatasan, kepulauan, Papua dan Papua Barat. Untuk desa mandiri pangan dilaksanakan pemberdayaan tahun ketiga dan keempat, sedangkan untuk kawasan mandiri pangan dilaksanakan pendampingan pada tahun kedua dan diberikan dana bansos dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi sehingga berhak untuk memperoleh dana bansos berikutnya.

Untuk kegiatan analisis ketersediaan, akses pangan dan kerawanan pangan dilaksanakan melalui penyusunan FSVA. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai informasi yang relevan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan ketersediaan pangan, penanganan rawan pangan dan akses pangan secara tepat dan cepat. Untuk mengawal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi secara periodik.

Kegiatan penanganan rawan pangan dan rangka pemberdayaan masyarakat di fokuskan pada kegiatan Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan mulai dilaksanakan pada tahun 2006 dan sampai dengan tahun 2013, jumlah desa yang diberdayakan sebanyak 1.625 desa atau 100 persen dari target sebanyak 1.625 desa, demikian juga untuk kegiatan

penanganan rawan pangan/SKPG sudah dilaksanakan 100 persen atau 433 lokasi. Sedangkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan telah terealisasi 100 persen yaitu 109 kawasan. Pada awalnya target Kawasan Mandiri Pangan sebanyak 121 kawasan, karena terkena penghematan BBM, maka target Kawasan Mandiri Pangan menjadi 109 kawasan.

Sedangkan kegiatan yang terkena penghematan adalah (1) Kawasan Mandiri Pangan dari 121 kawasan menjadi 109 kawasan; (2) penyusunan FSVA, (3) kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan, serta (4) kegiatan pembinaan/pemantauan. Untuk melihat kinerja per kegiatan pada aspek ketersediaan dan penanganan rawan pangan dapat dilihat pada **tabel 7** sebagaimana tercantum dalam lampiran .

Meskipun dari aspek anggaran sudah disalurkan ke semua desa/kawasan, namun secara teknis dan pemanfaatan masih ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Aksi Kawasan/Desa Mandiri Pangan adalah :

- a. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap kelompok afinitas masih belum optimal.
- b. Pelatihan untuk petugas pendamping masih kurang.
- c. Laporan perkembangan PMUK dan LKK sering mengalami keterlambatan.
- d. Masih kurangnya kesadaran anggota kelompok dalam mengembalikan dana PMUK yang digulirkan.
- e. Kondisi sarana prasarana minim, seperti : transportasi jalan (roda 4), air bersih, irigasi, listrik, infrastruktur, penyuluhan, dan kesehatan.
- f. Kondisi ketahanan pangan masih rentan terjadi rawan pangan karena rendahnya produksi pangan dan lemahnya daya beli.

Upaya yang perlu dilakukan dalam pemecahan masalah adalah :

- a. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendamping Desa/Kawasan Mandiri Pangan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendampingi kelompok afinitas .

- b. Meningkatkan koordinasi antara penyuluh pendamping dan Lembaga Keuangan Kelurahan. Serta perlunya dilakukan pembinaan terhadap Tim Pangan Desa sehingga mampu melaksanakan kegiatan operasional dengan lebih baik.
- c. Melakukan pendekatan kepada anggota kelompok agar memiliki kesadaran untuk mengembalikan dana PUMK, serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelompok.
- d. Menciptakan kerjasama dengan instansi atau sektor terkait untuk mendukung ketersediaan sarana/ prasarana, infrastuktur, air bersih, listrik, irigasi, dll.
- e. Perlu penanganan yang lebih serius pada daerah yang rentan terjadi Rawan Pangan baik dari segi akses, distribusi, peningkatan produksi pangan, kesehatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok afinitas.

Selain kegiatan Desa/Kawasan Mandiri Pangan, kegiatan lainnya adalah pembuatan Peta FSVA. Dalam penyusunan Peta FSVA, Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan World Food Programme (WFP). Hasil kajian *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dengan membandingkan antara FSVA 2013 dengan FSVA 2009, diketahui bahwa secara keseluruhan situasi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada beberapa indikator dalam hal peningkatan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan, perbaikan akses listrik, peningkatan akses air bersih, peningkatan sarana kesehatan, penurunan jumlah perempuan buta huruf, angka harapan hidup balita meningkat, dan penurunan angka balita *stunting*.

#### **4.2. PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN**

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan diarahkan untuk mengupayakan pengalokasian pangan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui analisis dan koordinasi kebijakan, mendorong

---

terciptanya stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, serta melakukan pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok lumbung pangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; (2) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat; (3) Pengendalian Kondisi Harga Pangan Pokok; (4) Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan; serta (5) Pengembangan Model Pemantauan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan.

Kegiatan LDPM dilaksanakan pada daerah sentra produksi untuk menjaga stabilitas harga beras/gabah dan jagung pada saat panen raya. Pada tahun 2013, realisasi jumlah Gapoktan yang diberdayakan melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi pangan Masyarakat (P-LDPM) sebanyak 293 Gapoktan atau 82,37 persen dari target sebanyak 556 Gapoktan, yang terdiri dari target tahap penumbuhan 75 gapoktan dan realisasi 74 gapoktan, serta target tahap kemandirian 225 gapoktan dan realisasi 219 gapoktan. Realisasi anggaran kegiatan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sebesar Rp. 49,29 milyar atau 94,51 persen dari pagu sebesar Rp. 46,59 milyar. Dalam pelaksanaan kegiatan LDPM masalah yang dihadapi antara lain :

- a. Dana di Gapoktan ada yang tidak berkembang
- b. Lahan pembangunan gudang belum dilengkapi dengan surat hibah dari pemilik lahan kepada gapoktan
- c. Pengembalian pinjaman cadangan pangan tidak lancar
- d. Sarana dan prasarana gapoktan belum lengkap
- e. Pengurus unit usaha belum berfungsi secara optimal
- f. Administrasi dan pelaporan belum dibuat secara tertib
- g. Sebagian Gapoktan belum memiliki jaringan kemitraan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi kegiatan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat adalah :

- a. Penetapan kelompok lumbung belum sesuai dengan ketentuan
- b. Gabah dikelompok lumbung dipinjam anggota tanpa adanya pengembalian.

- c. Dana lumbung digunakan untuk keperluan lain
- d. Administrasi kelompok lumbung belum sepenuhnya tertib

Kegiatan pemberdayaan lainnya adalah pemberdayaan lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan yang dibangun oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), pengisian dan pemberdayaannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan. Pada tahun 2013 dialokasikan dana Bansos kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat sebanyak 872 kelompok lumbung yang terdiri dari tahap pengembangan 619 kelompok dan tahap kemandirian 253 kelompok. Kegiatan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat pada awal target sasaran sebanyak 878 karena ada 4 kelompok lumbung pangan di Provinsi NTB yang tidak layak dilanjutkan, sehingga kelompok tersebut dihemat untuk penghematan BBM Tahun 2013. Realisasi anggaran kegiatan pengembangan lumbung pangan di pusat dan daerah sebesar Rp. 25,51 milyar atau 96,46 persen dari pagu sebesar Rp. 26,45 milyar. Untuk melihat kinerja kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dapat dilihat pada **tabel 8** sebagaimana terlampir.

Selain melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga melaksanakan kegiatan berupa analisis harga pangan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan nasional, seperti kebijakan HPP, kebijakan impor komoditas strategi (beras, kedele dan gula), kebijakan percepatan penyaluran raskin, dan percepatan pengadaan cadangan beras nasional.

#### **4.3. PENGEMBANGAN PENEGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR**

Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan diarahkan untuk mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui analisis, koordinasi kebijakan, promosi dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Kegiatan tersebut terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu: (1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); (2) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP; (3) Promosi P2KP; (4) Situasi Konsumsi Pangan

Peduduk; (5) Koordinasi Keamanan Pangan Segar; (6) Pengembangan Olahan Pangan Lokal; serta (7) Percontohan Fortifikasi Beras.

Beberapa kegiatan utama dalam rangka kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar adalah:

**a. Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)**

Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan utama yaitu: Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; Pengembangan Pangan Lokal; serta Promosi dan Sosialisasi P2KP.

Pada tahun 2013 jumlah desa P2KP yang diberdayakan sebanyak 6280 desa, terdiri dari 1.280 desa lanjutan tahun 2012 dan 5.000 desa baru tahun 2013. Pada pertengahan tahun 2013 terjadi penghematan anggaran pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan target desa baru yang semula 5.000 desa dikurangi 252 desa sehingga menjadi 4748 desa. Untuk desa lanjutan tahun 2012 mendapatkan bansos sebesar Rp.3.000.000 yang digunakan untuk pengembangan kebun bibit kelompok. Sedangkan desa baru tahun 2013 mendapatkan bansos sebesar Rp. 47.000.000 dengan rincian: (1) Rp. 30.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota; (2) Rp.12.000.000 untuk kebun bibit; (3) Rp. 3.000.000 untuk pengembangan kebun sekolah; dan (4) Rp. 2.000.000 untuk praktek pengembangan menu B2SA di kelompok

Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu desa P2KP ini terdiri dari kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh kelompok wanita, kegiatan pengembangan kebun sekolah oleh salah satu SD/MI yang ada di desa tersebut, serta pendampingan kegiatan oleh pendamping desa. Pada umumnya beberapa daerah mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana bansos, hal ini dikarenakan adanya pergantian pejabat/pimpinan di daerah yang begitu cepat. Selain itu, untuk kabupaten/kota yang dananya dekonsentrasi di provinsi, biasanya provinsi menunggu semua kabupaten/kota lengkap dulu semua

berkasnya baru diproses. Padahal proses pencairan tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan dari masing-masing kabupaten/kota. Hal lain juga yang menjadi kendala adalah kondisi alam/geografis lokasi kegiatan yang jauh dari kantor, sehingga butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca untuk melakukan proses pelaksanaan kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan kegiatan pada tahun 2012, kegiatan KRPL tahun 2013 dapat terlaksana lebih baik dari realisasi di lapangan karena paket bansos yang diberikan lebih lengkap dengan komponen biaya lebih besar. Namun secara realisasi keuangan kegiatan hingga tahun 2013 hanya dapat terealisasi sebesar 99,8%, padahal pada tahun 2012 terealisasi 100%. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun 2013 terjadi kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah sehingga mengurangi jumlah target desa baru tahun 2013 yang seharusnya 5.000 desa menjadi 4748 desa. Sedangkan dari sisi penganggaran, terealisasi sekitar 99,67% dari pagu dana yang dialokasikan.

Dari hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan, kegiatan KRPL ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para kelompok penerima manfaat serta dapat memberikan aspek pemberdayaan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya penghematan pengeluaran rumah tangga untuk belanja sayuran dan buah, karena komoditas tersebut sudah bisa didapat dari hasil pekarangan. Selain itu kelompok wanita penerima manfaat kegiatan KRPL ini juga mengalami penambahan jumlah anggota dikarenakan ketertarikan masyarakat untuk ikut serta merasakan manfaat dari kegiatan ini.

#### **b. Promosi P2KP**

Kegiatan promosi P2KP dilakukan di pusat dan di 33 provinsi. Promosi P2KP ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya penyebarluasan informasi, penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.

Kegiatan Promosi P2KP dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan seperti gerakan kampanye serta sosialisasi melalui media massa cetak maupun elektronik, promosi pola pangan B2SA seperti “One day No Rice”, Lomba Cipta Menu Pangan B2SA, pameran diversifikasi pangan fokus pada pengembangan pangan pokok lokal berbasis tepung-tepungan, gerakan kampanye kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal, serta melalui melibatkan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat. Beberapa kendala yang terjadi dalam kegiatan Promosi P2KP antara lain adalah:

1. Kreasi dan inovasi terhadap materi promosi di daerah belum berkembang, masih mencontoh materi/desain seperti yang di pusat, sehingga perlu dikembangkan lagi dengan menyesuaikan pada dana dan kemampuan masing-masing daerah.
2. Keterbatasan anggaran promosi, sehingga menyebabkan kegiatan promosi dan sosialisasi belum dilakukan secara masif.
3. Kegiatan promosi di daerah kurang terkoordinasi sehingga belum sejalan dengan kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan di pusat.

Capaian hasil promosi P2KP dituangkan dalam laporan yang terdiri dari 33 laporan di provinsi yang terealisasi sebesar 97% (31 laporan provinsi).

#### **c. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk**

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi di masa mendatang perlu diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis

---

pola konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, dan biasanya dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tahun 2015 dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Kegiatan situasi konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan penduduk dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap masyarakat dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yaitu : (1) analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, (2) kajian daftar komposisi bahan makanan, (3) apresiasi pengembangan pola konsumsi pangan, (4) workshop konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan dan (5) festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman.

Secara umum indikator kinerja kegiatan situasi konsumsi pangan penduduk dituangkan dalam laporan analisis pola konsumsi pangan yang terdiri dari 2 laporan tingkat pusat, 33 laporan tingkat provinsi dan 250 laporan tingkat kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tahun 2013 adalah 178 laporan (62,5%) yang terdiri dari pusat 100% (2 laporan), provinsi 45,5% (15 laporan) dan kabupaten/kota 64,4% (161 laporan). Anggaran APBN untuk kegiatan Situasi Konsumsi Pangan Penduduk adalah sebesar Rp. 1.862.050.000,- dan terealisasi sebesar 1.638.523.000,- atau 88,0 %.

Kendala yang dihadapi oleh provinsi dan kabupaten/kota yang belum melaksanakan pemantauan dan mengirimkan laporan analisis pola konsumsi pangan antara lain karena kurangnya SDM yang melakukan pemantauan

konsumsi, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan staf untuk melakukan analisis konsumsi pangan penduduk, serta dana yang terbatas.

**d. Koordinasi Keamanan Pangan Segar**

Penerapan praktik-praktik ketidakamanan pangan akan berdampak pada pangan yang beredar terhadap potensi bahaya yang akan muncul yaitu bahaya kimia, fisika dan biologi. Penggunaan pestisida yang berlebihan, pestisida yang dilarang dan pencemaran logam berat merupakan bahaya kimia sedangkan cemaran mikrobiologi seperti bakteri merupakan bahaya biologi. Bahaya-bahaya tersebut akan berpotensi muncul termasuk saat beredar di pasaran, sehingga perlunya suatu pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kasus-kasus ketidakamanan pangan yang beredar di pasar sebelum dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada prinsipnya keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan segar dan industri makanan serta konsumen. Pemerintah mempunyai peranan dalam pembinaan dan pengawasan kepada produsen dan konsumen tentang keamanan pangan secara nasional dan melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman. Bahkan secara jelas disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas keamanan pangan segar.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam penanganan keamanan pangan segar asal pertanian, tetapi pada kenyataannya penanganan keamanan pangan (khususnya kelembagaan dan pengawasannya) sampai dengan saat ini masih belum optimal dan terkoordinasi dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan keamanan pangan segar melalui rapat/pertemuan, penyusunan pedoman teknis, advokasi, sinkronisasi, dan koordinasi lintas sektor. Koordinasi penanganan keamanan pangan segar sangat diperlukan

untuk memperoleh kesatuan gerak langkah dalam mencapai tujuan bersama dalam rangka mewujudkan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat.

Maksud kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan kebijakan pusat dan daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan keamanan pangan segar yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penanganan keamanan pangan segar. Selain itu dukungan kegiatan koordinasi kemanana pangan segar, antara lain : (1) Promosi Keamanan Pangan Segar; (2) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar; (3) Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar; (4) Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh; (5) Operasional Sistem Manajemen Mutu LSP; (6) Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar; (7) Pengadaan Kendaraan Mobil Pengawas Keamanan Pangan Segar. Berikut ini dapat dilihat target pencapaian realisasi kegiatan seperti tabel 9 dibawah ini.

**Tabel 9. Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Tahun 2013.**

No	KEGIATAN	OUTPUT				ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan)	Desa	4.748	4.736	99,75	253.886.489	253.047.431	99,67
2	Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP	Laporan	531	495	8,27	48.215.781	44.808.339	92,93
3	Laporan Promosi P2KP	Laporan	33	31	97	12.759.781	11.988.265	93,95
4	Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Laporan	285	193	67,7	1.862.050	1.638.523	88,00
5	Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar	Laporan	35	27	77	3.656.955	3.408.102	93,19
6	Hasil Sosialisasi/Apresiasi Keamanan Pangan Segar	Laporan	1	1	100	81.000	80.731	99,66
7	Hasil Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan	Laporan	1	1	100	748.450	645.700	86,27
8	Hasil Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Laporan	1	1	100	240.200	237.298	98,79

9	Hasil Percontohan Fortifikasi beras	Laporan	1	1	100	3.454.060	213.551	6,18
10	Kendaraan Bermotor	Unit	31	22	70,96	7.675.000	7.217.671	94
11	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	53	50	94,3	838.110	827.742	98,76
12	Gedung/Bangunan	M2	146	121	82,88	213.610	204.571	95,77

Catatan: Kegiatan pada matriks di atas sesuai form PMK 249/2011

#### 4.4. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mengelola pelayanan kantor dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan serta mengembangkan model-model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat. Pelayanan kantor tersebut berupa: perencanaan, umum, keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan, serta dukungan manajemen dan administrasi daerah sehingga operasional kantor dan manajemen pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Disamping itu, dukungan manajemen dan teknis lainnya diarahkan untuk memfasilitasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat dalam menyelenggarakan sidang pleno, konferensi dan sidang regional dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Realisasi kegiatan perencanaan, penganggaran, dan keuangan sudah 100 persen dengan output 34 dokumen, yaitu penyusunan Renja KL dan RKA KL, dan Laporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta SIMAK BMN secara online. Anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh sisa anggaran yang tidak dapat terpakai dari setiap kegiatan. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam perencanaan, penganggaran, dan laporan keuangan tahun 2013, antara lain : (a) Kurangnya sosialisasi dan waktu terbitnya aturan yang singkat tentang revisi anggaran yang disebabkan kebijakan penghematan anggaran untuk subsidi BBM; (b) Perubahan kode akun pada pertengahan tahun anggaran sehingga memerlukan waktu yang

lama untuk revisi anggaran; (c) Adanya perubahan pejabat pengelola keuangan yang menyebabkan proses administrasi keuangan menjadi terhambat.

Realisasi kegiatan kepegawaian, organisasi, humas, dan hukum sebesar 100 persen dari target, dengan output yaitu 1 (satu) dokumen kepegawaian, organisasi, hukum dan humas; yang mencakup : (i) dokumen pengelolaan SDM; (ii) bahan perumusan organisasi dan tata laksana; (iii) bahan penyelenggaraan humas dan tata usaha; dan (iv) bahan penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan penyerapan anggaran hanya 65,49 persen dari pagu, yang disebabkan oleh : (1) Kegiatan penyusunan peraturan pemerintah masih banyak yang harus dibahas lebih lanjut dengan lintas kementerian/lembaga terkait yang memerlukan waktu cukup lama; (2) Penyusunan rancangan Perpres tenta kelembagaan dalam bentuk LPNK sudah diselesaikan namun oleh Setjen perlu dikaji kembali

Untuk peningkatan kesejahteraan petani kecil (*Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia/SOLID*) dengan pendanaan oleh IFAD di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 11 kabupaten, dengan komponen kegiatan terdiri dari: (1) Pengelolaan usaha tani terpadu dengan pelaksanaan demplot-demplot; (2) Pemberdayaan petani kecil; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan berupa federasi/gapoktan; (4) Dukungan manajemen dan administrasi; serta (5) Pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur. Selain itu, melaksanakan kegiatan dengan output generik berupa pengadaan kendaraan, komputer dan pembangunan/renovasi gedung/bangunan. Berikut realisasi penyerapan anggaran per jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 10. Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013.**

No	KEGIATAN	OUTPUT				ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan	Dokumen	34	34	100,00	18.381.126	17.068.046	92,86

No	KEGIATAN	OUTPUT				ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
2	Hasil pemantauan dan evaluasi program	Laporan	34	34	100,00	8.141.628	7.364.334	90,45
3	Dokumen kepegawaian, organisasi, humas, hukum	Dokumen	3	3	100,00	1.595.000	1.044.603	65,49
4	Sidang pleno, Konferensi dan Sidang Regional ketahanan pangan	Laporan	1	1	100,00	4.991.250	4.652.238	93,21
5	Hasil Usaha tani terpadu	Laporan	14	6	42,86	7.410.350	6.759.950	91,22
6	Pemberdayaan petani kecil	KK	6.930	2.482	35,81	13.809.900	13.414.250	97,13
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Desa	44	14	31,82	6.867.700	6.300.600	91,74
8	Dukungan manajemen dan administrasi	Bulan Layanan	2.594	1.673	64,5	33.321.773	23.809.629	71,45
9	Pengelolaan Sumberdaya dan infrastruktur	Unit	64	23	35,94	5.531.600	5.531.400	99,99
10	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	11	91,67	31.178.940	26.831.236	86,05
11	Kendaraan Bermotor	Unit	51	44	86,27	3.912.820	3.555.506	90,87
12	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	53	50	94,34	838.110	827.742.600	98,76
13	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	146	121	82,88	213.610.000	204.571.750	95,77

Catatan: Kegiatan pada matriks di atas sesuai form PMK 249/2011

Selama tahun 2013, pencapaian kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan, antara lain :

- a. Dari aspek perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah penerbitan dokumen perencanaan, seperti : DIPA Badan Ketahanan Pangan, POK, Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran, melakukan sosialisasi dan sinkronisasi persiapan program dan kegiatan tahun 2014, serta melakukan pengregistrasian project bantuan luar negeri.
- b. Pada aspek Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan laporan kinerja Badan Ketahanan Pangan, Laporan Kinerja Sekretariat Badan, Laporan Simonev dan UKP4, Laporan Hasil Tindak

Lanjut Pemeriksaan, melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta penyusunan Data dan Statistik Ketahanan Pangan sebagai bahan informasi untuk menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan.

- c. Aspek kepegawaian, hukum, humas dan Dewan Ketahanan Pangan, kegiatan yang telah dilakukan berupa penyusunan dokumen kepegawaian, penyusunan dokumen peraturan terkait dengan ketahanan pangan dan operasional kegiatan di Badan ketahanan Pangan, dokumen kehumasan, serta melakukan sosialisasi peraturan kepegawaian, kehumasan dan sosialisasi Undang-Undang Pangan serta melaksanakan Sidang pleno, Konferensi dan Sidang Regional ketahanan pangan.
- d. Aspek keuangan dan perlengkapan, kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan laporan keuangan dan aset serta laporan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan gedung.
- e. Aspek Pemeberdayaan Petani melalui kegiatan SOLID, kegiatan yang dilakukan berupa pemberdayaan. Pada tahun 2013, kelompok petani kecil yang diberdayakan hanya dapat direalisasikan sebanyak 2.482 Kepala Keluarga dari target 6.930 Kepala Keluarga (KK).

**BAB V**  
**PENUTUP**

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan nasional, dipengaruhi pula oleh peran serta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 43 tahun 2009, dimana instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan Ketahanan Pangan.

**Tabel 11. Matriks Dukungan Instansi yang Diharapkan**

No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
1.	Koordinator Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan</li> <li>• Percepatan penerbitan Inpres Pangkin (Pangan untuk Masyarakat Miskin)</li> </ul>
2	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan</li> <li>• Subsidi untuk daerah rawan pangan</li> </ul>
3	Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan pusat dan peraturan daerah terkait program diversifikasi pangan</li> <li>• Mendukung upaya diversifikasi melalui program Penyediaan Makanan Tambahan – Anak Sekolah (PMT-AS) berbasis Sumberdaya Lokal</li> </ul>
4	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan penataan kerjasama pemasaran</li> <li>• Mendorong sosialisasi/ promosi diversifikasi</li> </ul>

No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
		pangan kepada masyarakat
5	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah terutama komoditas pertanian dan peternakan</li> <li>• Kebijakan pengembangan industry pengolahan pangan</li> </ul>
6	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi</li> </ul>
7	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi komoditas pertanian di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan</li> </ul>
8	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi perikanan</li> <li>• Kebijakan penetapan score konsumsi ikan</li> <li>• Sosialisasi konsumsi ikan</li> <li>• Litbang teknologi budidaya dan pengolahan</li> </ul>
9	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha tani menjadi kelembagaan koperasi</li> </ul>
10	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan cinta pangan lokal dan diversifikasi pangan dalam kurikulum sekolah</li> </ul>
11	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan memasyarakatkan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang</li> <li>• Pengawasan produk pangan yang tidak aman dan tidak sehat</li> </ul>
12	Riset dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan lahan</li> <li>• Pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka diversifikasi pangan</li> </ul>
13	Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan memasyarakatkan diversifikasi pangan melalui media</li> <li>• Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat</li> </ul>
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan peningkatan peran perempuan melalui kelompok wanita tani</li> </ul>
15	BPOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengawasan produk pangan olahan hasil diversifikasi kelompok tani</li> </ul>
16	BMKG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wacana dan arahan penentuan masa tanam dan jenis tanaman yang cocok di masing-masing daerah</li> </ul>
17	Ditjen Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi</li> <li>• Sosialisasi/gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu sebagai alternative sumber karbohidrat</li> </ul>
18	Ditjen Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya</li> </ul>

No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
		<p>untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi/gerakan konsumsi sayur dan buah-buahan</li> </ul>
19	Ditjen PPHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu</li> </ul>
20	Sekretariat Jenderal-Kemtan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan sarana/prasarana promosi diversifikasi pangan</li> </ul>
21	BPSDMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan terkait dengan pola konsumsi yang B2SA</li> <li>• Penurunan konsumsi beras dan peningkatan PPH agar masuk dalam buku pintar penyuluhan</li> </ul>
22	BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan</li> </ul>
23	BPSBP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura</li> </ul>
24	BPPTPH (Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam mengelola pemanfaatan pekarangan</li> </ul>
25	Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian modal usaha melalui kredit usaha atau pinjaman lunak dengan bunga rendah, khususnya pengolahan pangan lokal non beras dan non terigu</li> </ul>
26	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan melalui media cetak/elektronik, <i>event organizer</i>, dan <i>lain-lain</i></li> </ul>
27	BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyediaan bahan baku yang mendukung usaha pertanian</li> <li>• membantu promosi diversifikasi pangan</li> </ul>
28	BPPT (Badan Pengkajian dan Penerepan Teknologi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adopsi teknologi pengolahan pangan (mesin penepungan, pembuatan mie)</li> </ul>

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2013 selesai disusun sesuai yang direncanakan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, bahwa "*setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya*". Salah satu laporan berkala yaitu laporan tahunan. Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 memuat berbagai informasi tentang potret kondisi organisasi seperti: profil pegawai, sarana prasarana, aset, hasil pelaksanaan program/kegiatan, penggunaan dan penyerapan anggaran, hambatan/tantangan dalam merealisasikan target, serta prestasi dan capaian program/kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2010 - 2014.

Pembangunan ketahanan pangan periode 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan, sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) program, yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; serta (4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Keempat kegiatan utama tersebut pada dasarnya untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, dengan penyempurnaan dan pemantapan secara terpadu dan terkoordinasi, rencana aksinya yaitu: (1) Pengembangan desa/kawasan Mandiri Pangan di daerah miskin dan rawan pangan kawasan perbatasan, kepulauan, Papua, dan Papua Barat, (2) Penanganan kerawanan pangan transien dan kronis, (3) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi pangan, (4) Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah, serta (5) Diversifikasi Pangan.

**Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013** disusun sebagai Laporan pertanggung-jawaban ke publik dan sekaligus sebagai alat evaluasi guna menyempurnakan hasil-hasil yang telah dicapai (maupun yang

---

belum dicapai) dalam rangka mencapai target dan sasaran pembangunan pertanian yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014. Laporan ini diharapkan dapat memberikan dukungan informasi kepada berbagai pihak baik instansi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan perguruan tinggi sebagai mitra dalam merumuskan/melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Disamping itu diharapkan pula dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk lebih mensinergikan dan mengefektifkan pengelolaan program dan kegiatan di masa mendatang. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang berifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang Kami tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Laporan Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Maret 2014  
Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Achmad Suryana

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
<b>BAB</b>	
<b>I SITUASI UMUM BADAN KETAHANAN PANGAN 2013 .....</b>	<b>1</b>
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.2 Struktur Organisasi .....	2
1.3 Dukungan Sumberdaya Manusia .....	5
1.4 Dukungan dan Perkembangan Anggaran .....	8
1.5 Sarana dan Prasarana .....	12
1.6 Prestasi .....	13
1.7 Hambatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013 .....	14
<b>II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN .....</b>	<b>16</b>
2.1 Visi .....	16
2.2 Misi .....	16
2.3 Tujuan .....	17
2.4 Sasaran Strategis .....	17
2.5 Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran .....	18
<b>III CAPAIAN TARGET UTAMA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Konsumsi Dan Keamanan Pangan .....	24
3.2 Stabilisasi Harga Pangan .....	28
3.3 Perkembangan Kerawanan Pangan .....	31
3.4 Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat .....	33
<b>IV CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT .....</b>	<b>36</b>
4.1 Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan .....	38
4.2 Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan .....	42
4.3 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar .....	44
4.4 Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan .....	51
<b>V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012 dan 2013 .....	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan 2013 .....	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Fungsional Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 dan 2013 .....	7
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Ketahanan Pangan yang Pensiun Tahun 2012 dan 2013 .....	8
Tabel 1.5 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2010 dan 2013 .....	9
Tabel 1.6 Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah Per Jenis Belanja pada TA. 2013 .....	10
Tabel 1.7 Alokasi Anggaran BKP Per Kegiatan TA. 2013 .....	11
Tabel 1.8 Posisi Barang Pada Neraca 2013.....	12
Tabel 3.1 Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Nilai PPH Tahun 2009 - 2013 .....	25
Tabel 3.2 Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2011 - 2013 .....	26
Tabel 3.3 Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2013 .....	29
Tabel 3.4 Capaian Indikator Coefisien Varian (CV) Tahun 2009-2013 .....	30
Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2010 dan 2013 .....	32
Tabel 4.1 Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2013 .....	38
Tabel 4.2 Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Tahun 2013 .....	40
Tabel 4.3 Realisasi Serapan Anggaran Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Tahun 2013 .....	44
Tabel 4.4 Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Tahun 2013 .....	50
Tabel 4.5 Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 .....	53
Tabel 5.1 Matriks Dukungan Instansi yang diharapkan .....	55

## BAB I

### SITUASI UMUM BADAN KETAHANAN PANGAN 2013

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa dalam menegakkan eksistensi dan kedaulatannya. Oleh karena itu, perwujudan ketahanan pangan harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengartikan ketahanan pangan sebagai *“kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau”*. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa untuk *ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat*.

Dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen pokok yang harus diperhatikan: (1) Ketersediaan pangan yang cukup dan merata; (2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; serta (3) Konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Ketiga komponen tersebut perlu diwujudkan sampai tingkat rumah tangga, dengan: (1) Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang beragam untuk peningkatan ketersediaan pangan dengan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan; (2) Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk kesehatan; (3) Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan ke seluruh wilayah dan terjangkau oleh masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (4) Memanfaatkan pasar pangan internasional secara bijaksana bagi pemenuhan konsumen yang beragam; serta (5) Memberikan jaminan bagi masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pangan yang bersifat pokok.

Untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan tersebut, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan kemudian menjabarkan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.

Laporan yang disajikan ini merupakan gambaran umum tentang situasi dan capaian program kegiatan ketahanan selama tahun anggaran 2013, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan dan penyempurnaan ke arah yang lebih baik khususnya dalam mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.

### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan**

Dalam melaksanakan perannya, Badan Ketahanan Pangan memiliki TUPOKSI sebagai berikut :

- a) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.
- b) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan.
- c) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- d) pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar.
- e) pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.

### **1.2. Struktur organisasi.**

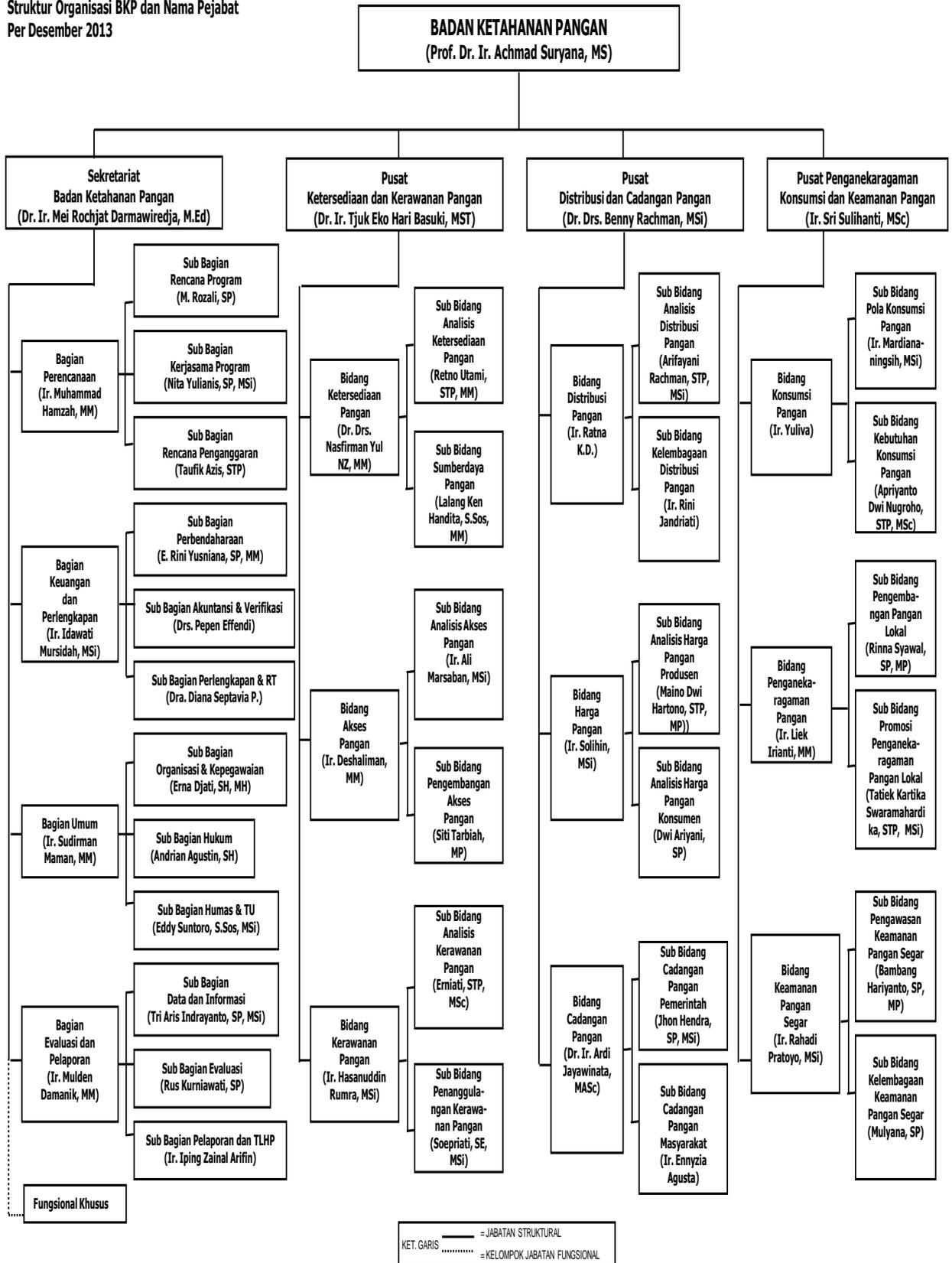
Organisasi Badan Ketahanan Pangan didukung 4 Eselon II:

- a) Sekretariat Badan, bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKP Kementerian Pertanian;
- b) Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, bertugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan,

dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;

- c) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, bertugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan.
- d) Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, bertugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, penganekaragaman pangan, serta pengawasan keamanan pangan segar.

Struktur Organisasi BPK dan Nama Pejabat  
Per Desember 2013



### 1.3 Dukungan Sumberdaya Manusia

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia aparat yang tersedia. Jumlah pegawai tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2012, yaitu 322 ke jumlah 304 pegawai. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang meninggal, pensiun, dan mutasi, namun tidak ada penambahan CPNS.

#### 1) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Pendidikan

Pegawai Badan Ketahanan Pangan memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari tingkat pendidikan terendah (SD) hingga tertinggi (S3). Sebanyak 119 atau 39,14 persen pegawai memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) dan sebanyak 7 atau 2,30 persen pegawai telah menempuh pendidikan doktor (S3) seperti pada **tabel 1.1**.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012 dan 2013**

Uraian	Jumlah Pegawai Pertahun		Perubahan
	Tahun 2012	Tahun 2013	
<b>1. Tingkat Pendidikan</b>	<b>322</b>	<b>304</b>	<b>-18</b>
(a) SLTA kebawah	109	103	-6
(b) Sarjana Muda dan D-3	10	10	0
(c) Sarjana Strata 1 dan D4	138	119	-19
(d) Strata-2 Magister	57	65	+8
(e) Strata-3 Doktor	8	7	-1
<b>2. Kepangkatan</b>	<b>322</b>	<b>304</b>	<b>-18</b>
(a) Golongan I	3	2	-1
(b) Golongan II	37	33	-6
(c) Golongan III	251	241	-10
(d) Golongan IV	31	28	-3
<b>3. Usia Pegawai</b>	<b>322</b>	<b>304</b>	<b>-18</b>
(a) Kurang dari 26 tahun	7	0	-7
(b) 26 – 35 tahun	109	96	-13
(c) 36 – 45 tahun	68	78	+10
(d) 46 – 50 tahun	56	47	-11
(e) Lebih dari 51 tahun	82	83	+1

2) Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan 2013

Pegawai Badan Ketahanan Pangan mempunyai golongan yang bervariasi dari Golongan I sampai dengan Golongan IV. Sebanyak 241 atau 79,27 persen pegawai termasuk kedalam Golongan III. Sementara itu, sebanyak 161 atau 52,96 persen pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 143 atau 47,03 persen pegawai berjenis kelamin perempuan. seperti disajikan pada **tabel 1.2** berikut ini:

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BKP Menurut Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Tahun	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Laki-laki	2	2	26	25	126	120	16	14	170	161
2	Perempuan	1	-	11	8	125	121	15	14	152	143
	Jumlah	3	2	37	33	251	241	31	28	322	304

3) Jumlah Pegawai menurut Fungsional

Badan Ketahanan Pangan memiliki jabatan fungsional khusus yaitu: (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) Muda; (2) Pranata Komputer Muda; (3) Statistisi Penyelia; (4) PMHP Pertama; (5) Pranata Komputer Pertama; (6) Statistisi Pertama. Badan ketahanan pangan memiliki 9 pegawai dengan jabatan fungsional, dimana jumlah jabatan fungsional terbanyak adalah statistisi pertama yaitu 3 pegawai atau 33,33 persen yang mengemban tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan dan analisis data serta pengembangan metode statistik. Adapun Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada **tabel 1.3**.

**Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Fungsional Badan Ketahanan Pangan Tahun 2012 dan 2013**

Unit Kerja	Jabatan												Jumlah	
	PMHP Muda		Statistisi Penyelia		Pranata Komputer Muda		PMHP Pertama		Pranata Komputer Pertama		Statistisi Pertama			
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Sekretariat Badan KP	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	4
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3
<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>

## 4) Jumlah Pegawai CPNS

Awal tahun 2013 Badan Ketahanan Pangan tidak menerima pegawai CPNS secara umum karena masih dalam moratorium.

## 5) Jumlah Pegawai Pensiun

Sampai dengan bulan Desember 2013, terdapat 19 pegawai Badan Ketahanan Pangan yang pensiun. Sebanyak 10 pegawai atau 52,63 persen dari total pegawai yang pensiun berada pada Golongan III dan selebihnya 9 pegawai atau 4,36 persen dari golongan IV, dapat dilihat pada **tabel 1.4** dibawah ini.

**Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Badan Ketahanan Pangan yang pensiun Tahun 2012 dan 2013**

No	Unit Kerja	Golongan III		Golongan IV		Jumlah	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Sekretariat Badan Ketahanan Pangan	4	3	4	5	8	8
2	Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1	2	2	-	3	2
3	Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan	1	5	1	-	2	5
4	Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	4	4	4	4
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>19</b>

#### 1.4. Dukungan dan Perkembangan Anggaran

Alokasi anggaran Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2009, antara lain :

- a) tahun 2009 ke 2010 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,61 milyar;
- b) tahun 2010 ke 2011 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu sebesar 231,27 milyar;
- c) tahun 2011 ke 2012 mengalami kenaikan sebesar 58,59 milyar; dan
- d) tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan sebesar 40,39 milyar.

Naik turunnya alokasi anggaran disebabkan perubahan kebijakan prioritas Kementerian Pertanian, serta perubahan kelompok penerima sasaran yaitu: Kawasan/Desa Mandiri Pangan, KRPL, Lumbung Pangan Masyarakat, dan LDPM.

Dalam melanjutkan pembangunan ketahanan pangan, pada awal TA. 2013 Badan Ketahanan Pangan (BKP) beserta lembaga ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota memperoleh alokasi anggaran senilai Rp. 692,070 milyar. Namun demikian, selama tahun berjalan terjadi penghematan pagu anggaran sebesar Rp. 30,73 milyar untuk subsidi BBM, dan penambahan

anggaran untuk Direktif Presiden sebesar Rp. 13,58 milyar, sehingga pagu akhir anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 647.16 milyar (tabel 1.6) Direktif Presiden untuk kegiatan KRPL di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sasaran 400 kelompok di 5 kabupaten/kota yaitu: Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Alor, Kupang, dan Kota Kupang. Jumlah alokasi anggaran tersebut turun Rp. 40,39 milyar atau 5,87 persen dibanding alokasi tahun 2012 sebesar Rp. 687,55 milyar. Alokasi penurunan anggaran tersebut di tingkat pusat sebesar Rp. 0,58 milyar atau 0,08 persen; dan di tingkat daerah sebesar Rp. 39,81 milyar atau 5,79 persen. Perbandingan alokasi dan realisasi anggaran BKP tahun 2009 sampai dengan 2013 ditampilkan pada **Tabel 1.5** .

**Tabel 1.5 Perbandingan Alokasi dan Realisasi Anggaran Lingkup BKP pada TA. 2010 dan 2013 (Rp. Milyar)**

Uraian	2010			2011			2012			2013		
	Pagu	Reals	%									
Pusat	59.12	51.14	86,50	72.2	58.22	80,64	75.87	63.38	83,54	75.29	60.1	79,82
Daerah	338.57	312.71	92,6	556.76	502.73	90,30	611.68	557.77	91,19	571.87	546.01	95,48
Prov	209.68	196.87	93,89	374.99	339.16	90,45	392.26	359.87	91,74	392.73	359.78	95,95
Kab/ Kota	128.89	115.84	89,88	181.77	163.57	89,99	219.42	197.9	90,19	179.14	186.23	94,58
<b>TOTAL</b>	<b>397.69</b>	<b>363.85</b>	<b>91,49</b>	<b>628.96</b>	<b>560.95</b>	<b>89,19</b>	<b>687.55</b>	<b>621.15</b>	<b>90,34</b>	<b>647.16</b>	<b>606.11</b>	<b>93,66</b>

Seluruh anggaran 2013 dialokasikan dalam 170 satker berupa : (a) Dana Sentralisasi di Pusat Rp. 75,29 milyar atau 11,63 persen; (b) Dana Dekonsentrasi (Dekon) di 33 provinsi Rp. 392.73 milyar atau 60,68 persen; (c) Dana Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten/kota sebesar Rp. 179,14 milyar atau 27,68 persen. Untuk kabupaten/kota yang tidak berdiri sendiri, anggarannya masuk dalam provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Realisasi anggaran BKP tahun 2013 mencapai 93,66 persen, diatas rata-rata realisasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun yang sama (**tabel 1.6**). Realisasi anggaran per jenis belanja tertinggi dicapai jenis belanja bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp. 99,48 persen dan terendah dicapai jenis belanja pegawai 84,96 persen. Sementara itu, berdasarkan jenis kewenangannya, realisasi tertinggi dicapai Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten/Kota sebesar Rp. 97,09 persen dan terendah dicapai dana tugas pembantuan provinsi sebesar Rp. 69,27 persen.

**Tabel 1.6. Realisasi Penyerapan Anggaran BKP Pusat dan Daerah per Jenis Belanja pada TA.2013 (dalam Rp. Juta)**

Ket	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal			Belanja Bantuan Sosial			Jumlah Anggaran		
	PAGU	REALI SASI	%	PAGU	REALI SASI	%	PAGU	REALI SASI	%	PAGU	REALI SASI	%	PAGU	REALI SASI	%
KP	19,842	16,856	84.95	53,033	40,833	76.99	2,420	2,410	99.62	0	0	0.00	75,295	60,099	79.82
DEKON	0	0	0.00	161,787	148,027	91.49	0	0	0.00	213,168	211,752	99.34	374,955	359,779	95.95
TP	0	0	0.00	77,612	67,976	87.59	10,303	9,525	92.45	108,995	108,732	99.76	196,910	186,233	94.58
PROP	0	0	0.00	7,628	2,931	38.43	10,140	9,376	92.46	0	0	100.00	17,768	12,307	69.27
KAB/ KOTA	0	0	0.00	69,984	65,045	92.94	163	149	91.61	108,995	108,732	99.76	179,142	173,926	97.09
TOTAL PUSAT/ DK/TP	19,842	16,856	84.95	292,432	256,836	87.83	12,723	11,935	93.81	322,163	320,484	99.48	647,160	606,111	93.66

Belum optimalnya penyerapan anggaran lingkup BKP antara lain disebabkan oleh: (1) Keterlambatan penerbitan SK Pengelola Keuangan baik di provinsi (Gubernur) dan TP (Menteri Pertanian), (2) Adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah menyebabkan sulitnya bagi provinsi untuk melakukan pembinaan atau pengawasan dalam penggunaan dana TP di kabupaten, sehingga terkadang provinsi terkesan lepas tangan dalam hal pembinaan penggunaan anggaran khususnya dana bansos; atau kabupaten/kota beranggapan bahwa tidak perlu ada laporan pertanggung

jawaban terhadap provinsi; (2) Pergantian pejabat (kepemimpinan) dan pelaksana kegiatan ketahanan pangan, serta bentuk kelembagaan di daerah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan anggaran dan terjadinya beberapa revisi anggaran; (3) Pemahaman petugas administrasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan masih kurang dan kreativitasnya juga masih kurang (sangat tergantung dari arahan pusat); (4) Keterbatasan sarana dan prasarana, serta banyaknya satker yang ditangani khususnya di tingkat provinsi (kab/kota melalui dana dekonentrasi) menyebabkan kesulitan dalam menyusun dan menyampaikan laporan; (5) Adanya perubahan kode MAK di pertengahan tahun sehingga terjadi hambatan yang dialami oleh beberapa kabupaten dalam melakukan revisi MAK, sehingga tidak dapat segera mencairkan anggaran untuk kegiatan; dan (6) Adanya penghematan di pertengahan tahun anggaran.

Alokasi anggaran Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 647,160 milyar yang digunakan untuk melaksanakan empat kegiatan utama (**tabel 1.7**) dengan sasaran kegiatan yang terdapat dalam laporan ini dengan rincian yaitu: (a) Pengembangan panganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (b) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan; (c) Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan; dan (d) Dukungan manajemen teknis lainnya.

**Tabel 1.7 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2013 (Rp. Juta)**

No	Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Penghematan
1	Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	101.519	88.009	13.510
2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	91.436	83.319	8.117
3	Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	353.693	339.638	14.055
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan	145.422	136.194	9.228
<b>Jumlah</b>		<b>692.070</b>	<b>647.160</b>	<b>44.910</b>

### 1.5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumberdaya penunjang dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Ketahanan Pangan, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berdaya guna akan memudahkan SDM Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan. Inventarisasi sarana dan prasarana di lingkungan Badan Ketahanan Pangan salah satunya dengan melaporkan SIMAK BMN.

Berdasarkan laporan posisi Barang Milik Negara pada neraca tahun 2013, sarana dan prasarana Badan Ketahanan Pangan memiliki nilai sebesar Rp. 22.843.883.210. Nilai barang tersebut meliputi: barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan hewan tanaman untuk dijual atau diserahkan pada masyarakat, peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan masyarakat, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, sebagaimana **Tabel 1.8** pada lampiran.

**Tabel 1.8 Posisi Barang Pada Neraca 2013**

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	55.649.577
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3.354.990
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	213.280.000
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	539.075.500
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	663.300.000
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.888.700.000
117131	Bahan Baku	0

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117199	Persediaan Lainnya	0
132111	Peralatan dan Mesin	43.883.897.483
133111	Gedung dan Bangunan	768.880.000
134112	Irigasi	12.500.000
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	25.280.447.987
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	156.762.408
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.541.670
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
162151	Software	96.243.699
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.495.969.103
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	2.342.215.077
<b>JUMLAH</b>		<b>22.843.883.210</b>

### 1.6. Prestasi

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan tugas secara insidental/diluar rencana berdasarkan perintah pimpinan serta kebijakan lainnya yang dianggap penting. Kegiatan tersebut lebih banyak bersifat koordinasi atau dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan intansi terkait baik di dalam maupun luar Kementerian Pertanian; serta di tingkat Internasional yang dikoordinasikan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *United Nations World Food Programme (WFP)*, maupun forum lainnya. Beberapa prestasi Badan Ketahanan Pangan, serta apresiasi dari masyarakat, pemerintah daerah, dan tingkat internasional kepada Badan Ketahanan Pangan di Pusat dan Daerah, seperti :

1. Memperoleh penghargaan internasional dari ***The Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)*** untuk kinerja Badan Ketahanan Pangan dalam

upaya pemberdayaan masyarakat miskin, dan disertai pemberian hadiah uang untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan sebesar USD 100.000,-

2. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dengan memakai frasa “*One Day No Rice*” ditingkat nasional bergema ke seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan menerapkan *one day no rice* atau istilah dan kegiatan yang terkait dengan upaya perubahan pemanfaatan substitusi pangan dari umbi-umbian.
3. Meningkatnya kesadaran pentingnya aspek ketahanan pangan dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dari lembaga legislatif di provinsi dan kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2013 hampir setiap bulan Badan Ketahanan Pangan mendapatkan kunjungan dari DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang ingin mendiskusikan ketahanan pangan, khususnya tentang kebijakan, program dan kegiatan, dan kelembagaan.
4. Melaksanakan kegiatan *Asean Plus Three Emergency Rice Reserve* (AFTERR) berupa hibah bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana di Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan, sebagai ketua APEC-PPFS (*Asia-Pacific Economic Cooperation – Policy Partnership on Food Security*) berhasil mengarahkan forum APEC ini menyusun *APEC-Food Security Road Map 2020*.
6. Badan Ketahanan Pangan untuk tahun 2013 mendapatkan penghargaan sebagai Tim Satlak SPI terbaik kedua, serta seluruh Eselon II lingkup BKP mendapatkan penghargaan wilayah bebas dari korupsi.
7. Badan Ketahanan Pangan selama tahun 2013 berhasil memperoleh kategori “putih” dalam Peta Rawan Korupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dinobatkan menjadi Tokoh Anti Korupsi Kementerian Pertanian Tahun 2013 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

### 1.7. Hambatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013

Pelaksanaan kegiatan dan program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2013 tidak terlepas dari permasalahan, kendala,

dan hambatan yang dialami pada tahun 2013. Hambatan tersebut menjadi bahan perbaikan bagi Badan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Berikut ini adalah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan program Badan Ketahanan Pangan tahun 2013:

1. Aspek pembangunan ketahanan pangan yang mencakup subsistem ketersediaan dan kerawanan pangan, subsistem distribusi pangan, subsistem konsumsi dan keamanan pangan, cukup luas dan terkait dengan berbagai sektor serta subsektor, sehingga memerlukan kebijakan yang terkoordinasi mulai dari pusat hingga kabupaten/kota.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 dan 41 Tahun 2007, bahwa Ketahanan Pangan menjadi urusan wajib di daerah. Namun, beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota belum membentuk Lembaga Ketahanan Pangan. Bagi daerah yang telah membentuk lembaga ketahanan pangan, sebagian besar masih tergabung dengan unit kerja lain, akibatnya program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditugaskan dari pusat ke daerah setiap tahun tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena jumlah SDM yang tersedia cukup terbatas.
3. Pelaksana kegiatan atau struktur organisasi kelembagaan ketahanan pangan di daerah sering berubah akibat terjadinya perubahan kepemimpinan, sehingga DIPA daerah harus revisi, sehingga pencairan, dan penggunaan anggaran menjadi terhambat, dan akhir pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai target dan sasaran yang diharapkan.
4. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang disepakati belum sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah.
5. Terjadinya bencana alam yang beruntun, mengakibatkan arah kegiatan menjadi berubah, terutama dalam penanganan bencana alam di daerah, dan disisi lain cadangan pangan daerah belum berkembang dan belum tertata dengan baik. Di sisi lain, penanganan daerah awan pangan berdasarkan analisis SKPG belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya pemahaman aparat pelaksana bahwa dana PDRP dapat dicairkan jika analisis SKPG dilakukan dengan baik.
6. Pedoman umum tidak segera diimplementasikan oleh provinsi dan kabupaten/kota ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk

Teknis (Juknis), sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan menjadi lamban dan kurang sinkron.

## BAB II

### KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

#### 2.1. VISI

Mengacu visi, arah, dan kebijakan pembangunan pertanian, Visi BKP Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 adalah: ***"menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam pemantapan ketahanan pangan"***. ***Handal*** berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. ***Aspiratif*** berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat. ***Inovatif*** berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru. Pemantapan Ketahanan Pangan adalah upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

#### 2.2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam tahun 2010-2014 sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan;
- b. Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat, daerah, dan nasional;
- c. Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;
- d. Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, pengembangan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

### **2.3. TUJUAN**

Seiring visi dan misi serta memperhatikan perkembangan masalah, tantangan, potensi, dan peluang, disusun tujuan pembangunan ketahanan pangan Tahun 2010-2014 ditujukan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
- b. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
- c. Mengembangkan sistem distribusi, harga, dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
- d. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
- e. Mengembangkan sistem penanganan keamanan pangan segar.

### **2.4. SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah disusun, sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200 kilo kalori per hari dan ketersediaan protein per kapita minimal 57 gram per hari;
- b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1 persen setiap tahun;
- c. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilo kalori per hari dan protein minimal sebesar 52 gram per hari;

- d. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5 persen per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
- e. Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
- f. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.
- g. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
- h. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

## **2.5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran strategis ketahanan pangan tersebut, ditempuh melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sebagai berikut:

### **A. Strategi**

Strategi yang akan ditempuh Badan Ketahanan Pangan yaitu :

- 1) Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
- 2) Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;
- 3) Mendorong peran serta swasta, masyarakat umum, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan pengawasan keamanan pangan segar;

- 4) Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan masyarakat;
- 5) Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
- 6) Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

Implementasi dari Strategi Badan Ketahanan Pangan tahun 2010-2014 tersebut, dilaksanakan melalui :

- a. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan dan akses pangan;
- b. Pemantapan sistem distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan;
- c. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- d. Penajaman keamanan pangan segar; dan
- e. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

Langkah operasional yang ditempuh dalam mengakomodasi strategi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pemantapan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, dengan cara: (a) mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi); (b) meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah; (c) Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (d) memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan; dan (e) meningkatkan akses pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.
- b. Pemantapan distribusi, stabilisasi harga dan cadangan pangan, dengan cara: (a) mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah

daerah (provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat; (b) mengembangkan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (penguatan LDPM) di daerah sentra produksi padi dan jagung; dan (c) memantau stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan serta daya beli masyarakat.

- c. Percepatan penganeekaragaman konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman, dengan cara: (a) sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan; (c) menumbuhkan dan mengembangkan industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu); (d) melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, dan lembaga swadaya masyarakat; dan (e) pengawasan keamanan pangan segar.
- d. Penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui : (a) koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor; (b) peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat; (c) koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan; (d) peningkatan pelayanan perkantoran dan perlengkapan terhadap program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; (e) pengembangan pemberdayaan masyarakat ketahanan pangan; dan (f) peningkatan efektivitas peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.

Untuk menopang berbagai strategi tersebut, strategi penunjang yang digunakan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi BKP, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang profesional, bersih, peduli, transparan, dan bebas KKN.
- b. Meningkatkan koordinasi perencanaan ketahanan pangan.
- c. Merumuskan produk hukum bidang ketahanan pangan yg berpihak kepada petani.
- d. Membangun sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan ketahanan pangan yang efektif.

- e. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam penanganan ketahanan pangan.

## **B. Kebijakan**

Kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang bersifat umum dan strategis tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan Badan Ketahanan Pangan, tetapi menyebar di berbagai subsektor lingkup Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya. Beberapa kebijakan yang berada dalam kewenangan dan penanganan dari BKP antara lain:

- a. Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan, diarahkan untuk: (i) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan; (ii) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.
- b. Peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakannya diarahkan untuk: (i) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan; (ii) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (iii) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan (iv) Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.
- c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, antara lain: (i) Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal; (ii) Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial; (iii) Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar;

- dan (iv) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
- d. Peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, antara lain: (i) Mendorong koordinasi program ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah; (ii) Meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat bersama pemerintah dalam rangka memantapkan ketahanan pangan; (iii) Meningkatkan peranan kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain: (i) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (ii) Peningkatan kerja sama internasional; (iii) Peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat; (iv) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (v) Dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

### C. PROGRAM

Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis ketahanan pangan tahun 2013, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai program pembangunan pertanian yang mengacu pada program pembangunan tahun 2010-2014 yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan sasaran (*outcome*) meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

Adapun indikator sasaran program (*outcome*) yaitu: (1) Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun; (2) Peningkatan diversifikasi/ penganekaragaman konsumsi pangan dengan pencapaian skor PPH menjadi 93,3 untuk tahun 2014; (3) Penurunan konsumsi beras per kapita

tiap tahun sebesar 1,5 persen; serta (4) Pengembangan lembaga distribusi masyarakat pada tahun 2014 menjadi 1.750 gapoktan, 2.000 lumbung dan 17 cadangan pangan pemerintah (provinsi) untuk menjaga kestabilan pangan pokok.

Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu:

- a. **Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**, dengan sasaran meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.
- b. **Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan**, dengan sasaran meningkatnya kualitas analisis ketersediaan dan akses pangan, serta penanganan rawan pangan.
- c. **Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar**, dengan sasaran meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.
- d. **Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan**, dengan sasaran terwujudnya pelayanan administrasi dan manajemen terhadap penyelenggaran ketahanan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (a) Pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan, untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan berbagai kegiatan; (b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan; dan (c) Pelayanan Publik atau Birokrasi, yang diarahkan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Namun demikian, kegiatan ini tidak dicantumkan dalam laporan ini karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap instansi, sehingga dianggap tidak dapat mewakili kinerja Badan Ketahanan Pangan.

### BAB III

#### CAPAIAN TARGET UTAMA PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN

Peningkatan Diversifikasi Pangan merupakan salah satu target Kementerian Pertanian tahun 2010 – 2014, karena terwujudnya pembangunan ketahanan pangan dapat dilaksanakan melalui penurunan konsumsi beras; peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, dan sayur-sayuran; serta peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

#### 3.1 KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Dalam periode 2009-2013, perkembangan agregat konsumsi pangan menunjukkan fluktuasi dimana terjadi penurunan maupun kenaikan, konsumsi energi perkapita perhari pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan serta konsumsi protein perkapita perhari tahun 2011 dan 2012 juga menunjukkan hal yang sama. Mengacu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan BPS menunjukkan, bahwa konsumsi penduduk Indonesia pada periode 2009–2013 mengalami sedikit penurunan, untuk: energi turun rata-rata 0,75 persen dan protein turun 0,57 persen pertahun, walaupun konsumsi energi dalam 2 tahun terakhir dan konsumsi protein 3 tahun pertama mengalami kenaikan, seperti dalam **tabel 3.1**.

Konsumsi pangan selama tahun 2011-2013 bersifat fluktuatif dan cenderung turun. Konsumsi energi perkapita perhari pada tahun 2007 mencapai 2,015 kilo kalori meningkat menjadi 2,038 kilo kalori tahun 2008, turun menjadi 1,927 dan 1,926 tahun 2009 dan 2010, tetapi pada tahun 2011 naik menjadi 1,952. Demikian juga untuk konsumsi protein per kapita per hari, pada tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan, tetapi naik pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 56,25. Selama periode 2007-2011, konsumsi perkapita perhari untuk energi pada tahun 2009, 2010, dan 2011 berada di bawah angka kecukupan yang dianjurkan WKNPG VIII tahun 2004 sebesar 2,000 kilo kalori, tetapi

konsumsi protein sudah berada diatas angka kecukupan yang dianjurkan sebesar 52 gram per kapita per hari.

Pada tahun 2013, terjadi perbaikan perhitungan angka skor PPH yang telah menyesuaikan dengan data konsumsi ikan dari publikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta perubahan pengeluaran sayur dan buah dari Ditjen Hortikultura. Berdasarkan hasil justifikasi data susenas, walaupun ada peningkatan skor PPH Nasional tahun 2013 sebesar 81,4 tetapi masih belum mencapai target PPH menurut Renstra Badan Ketahanan Pangan tahun 2010 – 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 yaitu 91,5.

**Tabel 3.1. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan protein serta Nilai PPH Tahun 2009 – 2013**

Konsumsi PPH	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	1964	1968	2005	1912	1937
Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	58.8	60.0	61.9	60.3	61.7
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79.4	82.3	84.6	83.9	81.4

*Sumber data : Susenas BPS, diolah kembali oleh BKP Kementerian Pertanian, dengan mempertimbangkan konsumsi ikan dan penyesuaian konsumsi sayuran dan buah-buahan berdasarkan proporsi pendapatan.*

Dari sisi komposisi keragaman konsumsi energi kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE), konsumsi masih didominasi kelompok pangan bersumber dari padi-padian yaitu diatas 60 persen, lebih besar dari proporsi ideal 50 persen. Konsumsi umbi-umbian hanya 2-3 persen, kurang dari proporsi ideal 6 persen, seperti dalam **tabel 3.2.**

Tabel 3.2. Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2011-2013

Kelompok Pangan	2011		2012		2013		Anjuran	
	Energi	% AKG	Energi	%AKG	Energi	%AKG	Energi	% AKG
a. Padi-padian	1.236	61,8	1.167	58,4	1.177	58,9	1.000	50,0
b. Umbi-umbian	53	2,7	40	2,0	38	1,9	120	6,0
c. Pangan hewani	168	8,4	165	8,3	157	7,9	240	12,0
d. Minyak dan lemak	204	10,2	212	10,6	205	10,3	200	10,0
e. Buah/biji berminyak	33	1,7	30	1,5	27	1,4	60	3,0
f. Kacang-kacangan	56	2,8	54	2,7	53	2,7	100	5,0
g. Gula	81	4,1	70	3,5	72	3,6	100	5,0
h. Sayur dan buah	97	4,9	97	4,9	117	5,9	120	6,0
i. Lain-lain	39	2,0	35	1,8	38	1,9	60	3,0
<b>Total</b>	2.005	100,3	1.912	95,6	1.937	96,9	2000	100
<b>Skor PPH</b>	<b>84,6</b>		<b>83,9</b>		<b>88,9</b>		<b>100</b>	

Sumber data : Susenas BPS 2011 – 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian

Berdasarkan data di atas, konsumsi padi – padian, minyak dan lemak sudah melampaui anjuran, tetapi umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan buah belum memenuhi komposisi konsumsi ideal anjuran. Secara nasional, kualitas/keragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor PPH mengalami fluktuasi dari 84,6 pada tahun 2011 menjadi 83,9 pada tahun 2012 kemudian naik menjadi 88,9 pada tahun 2013. Oleh karena itu untuk meningkatkan hal tersebut diperlukan: (1) peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan B2SA melalui KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); (2) Penyediaan sayuran & buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH).

Berbeda dengan skor pola pangan harapan, indikator penurunan konsumsi beras menunjukkan kondisi yang semakin baik dan mencapai target 1,5 persen per tahun. Berdasarkan data sasaran BPS pada tahun 2012 turun sebesar 5,33 persen dibandingkan tahun 2011. Sementara untuk tahun 2013, angka konsumsi beras Indonesia sebesar 96,32 kg/kapita. Angka ini menunjukkan penurunan konsumsi beras sebesar 0,3 kg/kapita dibandingkan tahun 2012.

Upaya penurunan konsumsi beras ini dilakukan melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal yang diimplementasikan melalui kegiatan, antara lain: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Penyuluhan kepada siswa SD/MI, dan (4) Sosialisasi dan Promosi. Kedepan penurunan konsumsi beras perlu introduksi komponen kegiatan di dalam dan luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian. Saat ini kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, terutama karena kelompok sudah termotivasi dan mempunyai kemampuan kerjasama usaha kelompok. Kegiatan promosi untuk meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan juga menunjukkan pengaruh langsung terhadap penurunan konsumsi beras, hal ini dapat dilihat dari perilaku konsumsi pangannya yang sudah beragam.

Dari aspek keamanan pangan, kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta ketidaksesuaian dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Dengan pangan yang aman diharapkan dapat mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia.

Dalam aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut, yaitu: (a) ketidakamanan pangan yang disebabkan adanya residu pestisida pada berbagai jenis hasil pertanian terutama pada sayuran, buah, dan pangan segar lainnya; (b) perilaku produsen pangan segar yang menggunakan zat pengawet, zat pewarna, dan zat pemanis buatan yang tidak sesuai ketentuan; serta (c) perilaku konsumen yang sebagian besar masih belum mengonsumsi pangan yang aman. Tiga hal tersebut dapat menimbulkan keracunan pada makanan, bahkan dapat menjadi salah satu penyebab Penyakit Bawaan Makanan/PBM (*food borne diseases*) bagi konsumen, karena cemaran racun kimia atau toxin, logam berat, dan bahan kimia lainnya, serta cemaran mikroba dari bakteri, jamur, parasit, dan virus.

Kasus keracunan pangan yang melanda masyarakat, biasanya disebabkan oleh kontaminasi pada berbagai jenis pangan segar diantaranya oleh: (a) bahan kimia berupa residu pestisida (biasanya digunakan untuk pemberantasan hama dan penyakit dan sebagian masih tertinggal pada tanaman yang melebihi ambang batas yang ditetapkan untuk kesehatan manusia), residu obat hewan, logam berat (Hg, Pb, dan Cd), *aflatoxin*, bahan tambahan pangan yang berlebihan dan berbahaya; (b) cemaran biologis yang berasal dari mikroba bakteri, kapang, *khamir*, *protozoa*, dan *virus*.

Dalam rangka peningkatan penanganan pangan segar, Badan Ketahanan Pangan, telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah: (a) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar; (b) Pengawasan Keamanan Pangan Segar; dan (c) Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan Segar baik di pusat maupun daerah (provinsi atau kab/kota).

### **3.2. STABILISASI HARGA PANGAN**

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi pangan. Stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan, misalnya beras dan kedelai. Ketidakstabilan harga pangan dapat memicu tingginya harga pangan di dalam negeri sehingga aksesibilitas

masyarakat terhadap pangan secara ekonomi akan menurun yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kerawanan pangan. Berikut perkembangan rata-rata harga pangan nasional per komoditi tahun 2013 dapat dilihat pada **tabel 3.3**.

**Tabel 3.3. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2013**

No	Komoditas	Rerata (Rp/kg)	CV (%)	Max (Rp/kg)	Min (Rp/kg)
1	Beras Umum	10.855	1,31	11.047	10.646
2	Beras Termurah	8.583	1,12	8.712	8.429
3	Daging Ayam	29.767	9,74	34.782	26.800
4	Daging Sapi	92,737	2,55	97.986	89.495
5	Gula Pasir	11.890	0,69	11.964	11.690
6	Cabe Merah	33.591	19,62	43.881	25.556
7	Cabe Rawit	30.810	28,75	49.113	21.762
8	Bawang Merah	36.396	32,02	55.881	20.881
9	Bawang Putih	21.665	40,03	43.069	14.554
10	Kedelai	9.592	5,31	10.357	9.160
11	Migor Curah	13.225	5,10	14.633	12.649
12	Migor Kemasan	12.848	0,77	13.002	12.719
13	Telur Ayam	17.650	6,95	19.746	16.172

Sumber : Data BPS diolah oleh BKP, kecuali jagung dari Kemendag. \*) Data sementara sampai dengan Mg-II Desember 2013

Berdasarkan data di atas, perkembangan harga komoditas pangan selama tahun 2013, terjadi kenaikan harga relatif kecil pada komoditi seperti beras, jagung, daging sapi, daging ayam dan telur. Kenaikan harga tertinggi terdapat pada 4 komoditas yang mengalami gejolak harga (CV >10 persen), yaitu cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih. Sementara untuk harga komoditas yang mengalami penurunan harga adalah gula dan bawang putih.

Khusus untuk harga beras selama periode 2009–2013 kondisinya lebih stabil dengan capaian Indikator *Coefisien Varian (CV)* sebesar 3,35, seperti pada **tabel 3.4** dibawah ini.

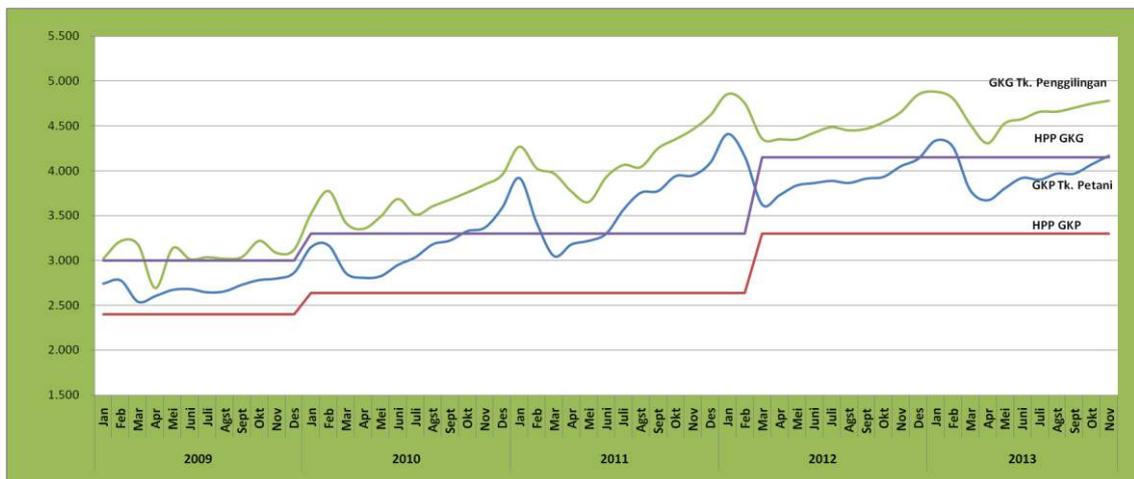
**Tabel 3.4. Capaian Indikator Coefisien Varian (CV) Tahun 2009 – 2013**

Tahun	Coefisien Varian (CV) Komoditi Beras	
	Umum (%)	Termurah (%)
2009	1,29	0,96
2010	7,22	8,57
2011	5,83	6,76
2012	1,09	1,06

Keterangan : Data Desember 2013 masih angka sementara, - Sumber : BPS, diolah BKP

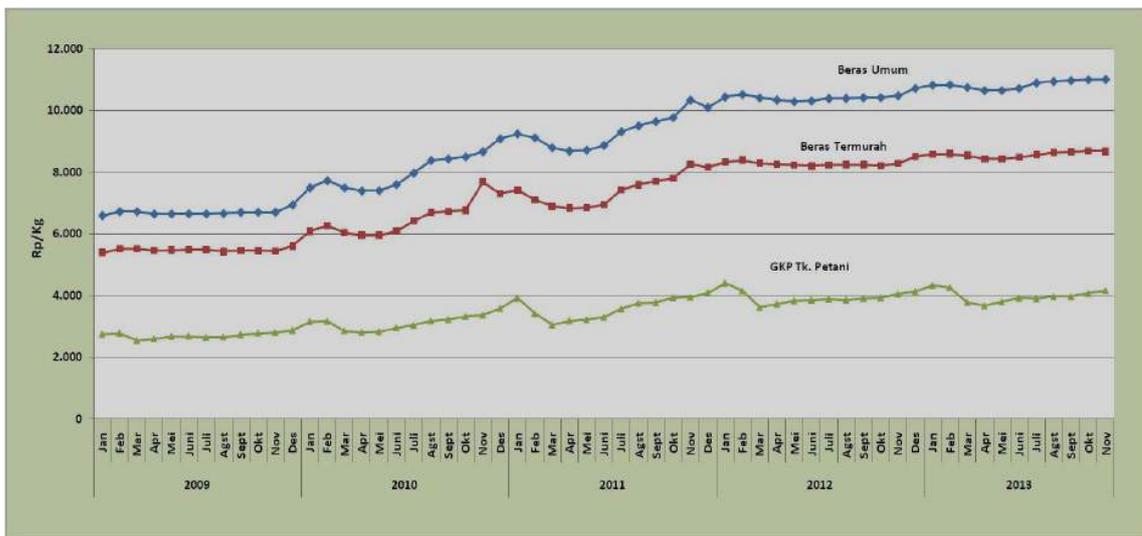
Perkembangan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dan Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bila dilihat berdasarkan **grafik 1** di bawah, harga GKP dan GKG pada November-Januari pada setiap tahunnya cenderung naik karena terjadi musim tanam (paceklik).

**Grafik 1. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani dan GKG di Tingkat Penggilingan Tahun 2009 – 2013**



Sementara itu, bila dilihat dari **grafik 2** perkembangan harga GKP di tingkat petani dan beras eceran selama 5 tahun terakhir, pola pergerakan harga beras lebih besar (0,91 persen) daripada harga GKP (0,84 persen), sedangkan harga beras periode bulan November sampai dengan Januari cenderung naik.

**Grafik 2. Perkembangan Harga GKP Tingkat Petani dan Beras Eceran Tahun 2009-2013**



Sumber : BPS, diolah BKP

### 3.3. PERKEMBANGAN KERAWANAN PANGAN

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan (rawan ketahanan pangan) yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) jangka waktu/periode kejadian dengan katagori *kronis* untuk jangka panjang dan *transien* untuk jangka pendek/fluktuasi, Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.000, Jika konsumsi per kapita kurang atau lebih kecil dari 70 persen dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 hingga 90 persen dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90 persen dari AKG termasuk katagori tahan pangan. Berikut perkembangan jumlah penduduk yang rentan terhadap rawan pangan, seperti tertera pada **tabel 3.5**.

Tabel 3.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Tahun 2010–2013

Rincian	2011	2012	2013	Pertumbuhan (%/Tahun)
Jumlah Penduduk Sangat Rawan <sup>a)</sup> :				
1. Jumlah (juta Jiwa)	42,08	47,65	47,02	5,96
2. Persentase	17,41	19,46	19,04	4,81
Jumlah Penduduk Rawan <sup>b)</sup> :				
3. Jumlah (juta Jiwa)	78,49	80,58	83,65	3,23
4. Persentase	32,48	32,91	33,87	2,12
Jumlah Penduduk Tahan Pangan <sup>c)</sup> :				
5. Jumlah (juta Jiwa)	121,01	116,61	116,31	-1,95
6. Persentase	50,10	47,63	47,09	-3,03

Sumber data: BPS tahun 2011 - 2013, diolah BKP Kementerian Pertanian,

Catatan: (a) konsumsi kalori perkapita perhari kurang < 70% dari AKG; (b) Konsumsi kalori perkapita perhari 70-90% dari AKG; dan (c) Kosumsi kalori perkapita perhari > 90% dari AKG,

Jumlah penduduk yang rawan pangan serta jumlah daerah rawan bencana masih cukup tinggi, terutama pada berbagai daerah yang terisolir dan pada waktu-waktu tertentu terkena musim kering, musim ombak besar, dan sebagainya, penduduk dan daerah yang rawan tersebut. Kondisi tersebut perlu ditangani secara komprehensif melalui upaya antisipatif terhadap timbulnya kasus kerawanan pangan. Jumlah penduduk yang: (a) sangat rawan pangan pada tahun 2011 sekitar 42,08 juta bertambah menjadi 47,65 juta pada tahun 2012, pada tahun 2013 bertambah menjadi 47,02 juta; (b) rawan pangan pada tahun 2011 mencapai 78,49 juta, bertambah menjadi 80,58 juta pada tahun 2012, dan bertambah lagi menjadi 83,65 juta pada tahun 2013; sedangkan (c) penduduk tahan pangan pada tahun 2011 sebanyak 121,01 juta, menurun menjadi 116,61 juta pada tahun 2012, pada tahun 2011 berkurang menjadi 116,31 juta. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran jumlah penduduk yang tahan pangan menjadi tidak tahan pangan.

Badan Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi rawan pangan, yaitu dengan melakukan Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Program tersebut telah

memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kerawanan pangan, antara lain:

- a. Kasus kekurangan pangan pokok secara agregat menurun sebesar 10,7 persen dari 39,8 persen menjadi 29,0 persen. Penurunan kasus kekurangan pangan pokok ini terjadi lebih cepat di luar Jawa (12,69 persen) dibandingkan di Jawa (3,4 persen).
- b. Adanya peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat sebesar 7,9 persen.
- c. Indikator rawan pangan, yaitu berat badan balita di bawah berat standar secara agregat juga mengalami penurunan signifikan dari 9 persen menjadi 4,5 persen.
- d. Secara agregat, rumah tangga keluarga dengan katagori “sangat miskin” dan “miskin” menurun secara signifikan. Akselerasi penurunan terjadi lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa.

### **3.4. UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

Upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional masih diwarnai dengan berbagai permasalahan pangan. Pada tataran global, ketersediaan pangan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk dunia merupakan ancaman yang serius bagi ketahanan pangan nasional. Kebutuhan pangan dunia dalam 4 dekade mendatang, populasi global diperkirakan akan mencapai 9 milyar. Maka untuk mencukupi pangan bagi seluruh penduduk tersebut, perlu tambahan produksi pangan sekitar 70 persen dari kondisi yang ada saat ini.

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus meningkat, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh bangsa Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, dapat menjadi ancaman yang besar dalam penyediaan pangan nasional, karena permintaan pangan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Dinamika permintaan, menyebabkan kebutuhan pangan meningkat dalam jumlah, mutu, keragaman jenis, dan keamanan.

Sementara itu, kapasitas produksi pangan nasional terkendala karena adanya kompetisi pemanfaatan dan penurunan kualitas sumberdaya alam, serta penerapan teknologi belum optimal. Apabila tidak diantisipasi, dikhawatirkan akan dapat mengganggu neraca pangan nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal, penyediaan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan SDM yang memadai.

Masalah ketahanan pangan juga terkait dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin sehingga berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan nasional. Pada aspek distribusi pangan, fluktuasi masih menjadi masalah serius yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan dalam negeri, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan.

Pada aspek konsumsi pangan, sebagian besar kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat masih rendah, yang dicirikan dengan belum tercapainya pencapaian sasaran Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, termasuk salah satunya adalah faktor kemiskinan. Selain itu, berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah.

Dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan berbagai kegiatan strategis, diantaranya adalah :

- a. Program Aksi Desa Mandiri Pangan, dengan sasaran daerah rawan pangan, tujuannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat miskin agar mampu mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya.

- b. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).
- c. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM), kegiatan ini difokuskan pada daerah sentra produksi pangan (beras dan jagung) untuk mencegah terjadinya jatuhnya harga beras/jagung pada saat panen raya.
- d. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.
- e. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang bergizi berimbang dan aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Penanganan Keamanan Pangan Segar, dan
- g. Pemantauan harga pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

## **BAB IV**

### **CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

Program dan kegiatan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional sesuai dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2014, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peran serta dukungan instansi terkait sesuai dengan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2013 merupakan lanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya, dengan program-program aksinya sebagai berikut :

- a. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi: (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Promosi; (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; serta (3) Promosi dan Sosialisasi P2KP. Kegiatan tersebut juga didukung konsumsi pangan yang aman melalui kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan pangan segar.

- b. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, yaitu: (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); (2) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat; (3) Pengendalian Kondisi Harga Pangan Pokok; serta (4) Pengembangan Model pemantauan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan.
- c. Program aksi pada kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu : (1) Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan di Wilayah Perbatasan, Kepulauan, Papua dan Papua Barat, (2) Pengembangan Desa Mandiri Pangan, (3) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (4) Penyusunan FSVA; dan (5) Analisis Ketersediaan Pangan melalui Neraca Bahan Makanan (NBM).

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di daerah yang diarahkan untuk: (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; (3) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan; serta (4) pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkarya dalam pembangunan ketahanan pangan.

Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2013 juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, dengan program aksinya adalah “Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/*Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia* (SOLID) dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga”. Program aksi tersebut didanai oleh *International Fund For Agricultural Development* (IFAD) dan dilaksanakan di 14 kabupaten pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Fokus pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2013 adalah mempercepat pencapaian “Peningkatan Diversifikasi Pangan” sebagai salah satu dari empat kunci sukses pembangunan pertanian tahun 2010-2014.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang dikelola oleh Badan

Ketahanan Pangan selama tahun 2013, menunjukkan penyerapan realisasi anggaran sebesar 93,66 atau Rp. 606.112.604.135 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 647.159.931.000. Penyerapan anggaran tertinggi berdasarkan kegiatan dicapai kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar sebesar 96,37 persen, sedangkan penyerapan terendah terjadi pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya sebesar 85,29 persen. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan penyerapan PHLN pada *project* SOLID sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 4.1** di bawah ini.

**Tabel 4.1. Realisasi Serapan Anggaran Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2013**

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	(%)
1.	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	83.318.628.000	77.534.237.267	92,60
2.	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	88.009.540.000	82.534.895.267	93,78
3.	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	339.637.956.000	329.151.639.082	96,91
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	136.193.807.000	117.272.832.057	86,11
	T o t a l	647.159.931.000	606.112.604.135	93,66

Sumber : SAU dan PMK 249/2011

#### **4.1. PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN**

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan diarahkan untuk mengupayakan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau serta mengurangi jumlah penduduk rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dibagi dalam 5 subkegiatan yang meliputi: (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan); (2) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); (3) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) Provinsi; (4)

Kajian Ketersediaan Pangan, Rawan Pangan dan Akses Pangan; serta (5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Desa dan Kawasan Mandiri Pangan.

Pendampingan desa mandiri pangan masih dilanjutkan pelaksanaannya pada Kawasan Mandiri Pangan di daerah perbatasan, kepulauan, Papua dan Papua Barat. Untuk desa mandiri pangan dilaksanakan pemberdayaan tahun ketiga dan keempat, sedangkan untuk kawasan mandiri pangan dilaksanakan pendampingan pada tahun kedua dan diberikan dana bansos. Pemberian dana bansos tersebut diberikan kepada kelompok Demapan dan kawasan Mandiri Pangan yang lulus atau layak memperoleh dana bansos berikutnya.

Untuk kegiatan analisis ketersediaan, akses pangan dan kerawanan pangan dilaksanakan melalui penyusunan FSVA. Hasil analisis tersebut digunakan pimpinan dalam menetapkan kebijakan ketersediaan pangan, penanganan rawan pangan dan akses pangan secara tepat dan cepat. Untuk mengawal pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi secara periodik.

Kegiatan penanganan rawan pangan dan rangka pemberdayaan masyarakat difokuskan pada kegiatan Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan mulai dilaksanakan pada tahun 2006 dan sampai dengan tahun 2013, jumlah desa yang diberdayakan sebanyak 1.625 desa atau 100 persen dari target sebanyak 1.625 desa. Demikian juga untuk kegiatan penanganan rawan pangan/SKPG sudah dilaksanakan 100 persen atau 433 lokasi, sedangkan kegiatan Kawasan Mandiri Pangan telah terealisasi 100 persen yaitu 109 kawasan. Pada awalnya target Kawasan Mandiri Pangan sebanyak 121 kawasan, namun karena terkena penghematan BBM, maka target Kawasan Mandiri Pangan menjadi 109 kawasan.

Kegiatan yang terkena penghematan adalah (1) Kawasan Mandiri Pangan dari 121 kawasan menjadi 109 kawasan; (2) penyusunan FSVA, (3) kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan, serta (4) kegiatan pembinaan/pemantauan. Untuk melihat kinerja per kegiatan pada aspek ketersediaan dan penanganan rawan pangan dapat dilihat pada **tabel 4.2.**

Tabel 4.2 Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Tahun 2013

No	KEGIATAN	OUTPUT				ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan	Desa	1.625	1.625	100,00	60.145.510	56.592.151	94,09
2	Lokasi Penanganan Rawan Pangan, SKPG	Lokasi	433	433	100,00	13.641.350	11.912.589	87,33
3	Laporan Hasil Penyusunan FSVA Nasional	Laporan	1	1	100,00	300.000	290.614.450	96,87
4	Laporan Kajian ketersediaan pangan, rawan pangan dan akses pangan	Laporan	36	36	100,00	2.100.000	1.860.148	88,58
5	Laporan Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan	Laporan	1	1	100,00	600.000	551.610	91,94
6	Laporan Kegiatan dan Pembinaan ( <i>Output Generik</i> )	Laporan	43	33	76,74	1.010.310	921.620	91,20

Catatan: Kegiatan pada matriks di atas sesuai form PMK 249/2011

Meskipun dari aspek anggaran sudah disalurkan ke semua desa/kawasan, namun secara teknis dan pemanfaatan masih ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Aksi Kawasan/Desa Mandiri Pangan adalah:

1. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap kelompok afinitas masih belum optimal.
2. Pelatihan untuk petugas pendamping masih kurang.
3. Laporan perkembangan PMUK dan LKK sering mengalami keterlambatan.
4. Masih kurangnya kesadaran anggota kelompok dalam mengembalikan dana PMUK yang digulirkan.

5. Kondisi sarana prasarana minim, seperti : transportasi jalan (roda 4), air bersih, irigasi, listrik, infrastruktur, penyuluhan, dan kesehatan.
6. Kondisi ketahanan pangan masih rentan terjadi rawan pangan karena rendahnya produksi pangan dan lemahnya daya beli.

Upaya yang perlu dilakukan dalam pemecahan masalah adalah:

1. Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga pendamping Desa/Kawasan Mandiri Pangan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendampingi kelompok afinitas .
2. Meningkatkan koordinasi antara penyuluh pendamping dan Lembaga Keuangan Kelurahan. Serta perlunya dilakukan pembinaan terhadap Tim Pangan Desa sehingga mampu melaksanakan kegiatan operasional dengan lebih baik.
3. Melakukan pendekatan kepada anggota kelompok agar memiliki kesadaran untuk mengembalikan dana PUMK, serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kelompok.
4. Menciptakan kerjasama dengan instansi atau sektor terkait untuk mendukung ketersediaan sarana/ prasarana, infrastuktur, air bersih, listrik, irigasi, dll.
5. Perlu penanganan yang lebih serius pada daerah yang rentan terjadi Rawan Pangan baik dari segi akses, distribusi, peningkatan produksi pangan, kesehatan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok afinitas.

Selain kegiatan Desa/Kawasan Mandiri Pangan, kegiatan lainnya adalah pembuatan Peta FSVA. Dalam penyusunan Peta FSVA, Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan World Food Programme (WFP). Hasil kajian *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) dengan membandingkan antara FSVA 2013 dengan FSVA 2009, diketahui bahwa secara keseluruhan situasi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada beberapa indikator dalam hal peningkatan ketersediaan pangan, penurunan angka kemiskinan, perbaikan akses listrik,

peningkatan akses air bersih, peningkatan sarana kesehatan, penurunan jumlah perempuan buta huruf, angka harapan hidup balita meningkat, dan penurunan angka balita *stunting*.

#### **4.2. PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN**

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan diarahkan untuk mengupayakan pengalokasian pangan kepada masyarakat secara efektif dan efisien melalui analisis dan koordinasi kebijakan, mendorong terciptanya stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, serta melakukan pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok lumbung pangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah : (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; (2) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat; (3) Pengendalian Kondisi Harga Pangan Pokok; (4) Pemantauan/Pengumpulan Data Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan; serta (5) Pengembangan Model Pemantauan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan.

Kegiatan LDPM dilaksanakan pada daerah sentra produksi untuk menjaga stabilitas harga beras/gabah dan jagung pada saat panen raya. Pada tahun 2013, realisasi jumlah Gapoktan yang diberdayakan melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) sebanyak 293 Gapoktan atau 82,37 persen dari target sebanyak 556 Gapoktan, yang terdiri dari target tahap penumbuhan 75 gapoktan dan realisasi 74 gapoktan, serta target tahap kemandirian 225 gapoktan dan realisasi 219 gapoktan. Realisasi anggaran kegiatan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sebesar Rp. 49,29 milyar atau 94,51 persen dari pagu sebesar Rp. 46,59 milyar. Dalam pelaksanaan kegiatan LDPM masalah yang dihadapi antara lain:

- a. Dana di Gapoktan ada yang tidak berkembang;
- b. Lahan pembangunan gudang belum dilengkapi dengan surat hibah dari pemilik lahan kepada gapoktan;

- c. Pengembalian pinjaman cadangan pangan tidak lancar
- d. Sarana dan prasarana gapoktan belum lengkap
- e. Pengurus unit usaha belum berfungsi secara optimal
- f. Administrasi dan pelaporan belum dibuat secara tertib
- g. Sebagian Gapoktan belum memiliki jaringan kemitraan.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi kegiatan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat adalah :

- a. Penetapan kelompok lumbung belum sesuai dengan ketentuan
- b. Gabah dikelompok lumbung dipinjam anggota tanpa adanya pengembalian.
- c. Dana lumbung digunakan untuk keperluan lain
- d. Administrasi kelompok lumbung belum sepenuhnya tertib

Kegiatan pemberdayaan lainnya adalah pemberdayaan lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan yang dibangun oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), pengisian dan pemberdayaannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan. Pada tahun 2013 dialokasikan dana Bansos kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat sebanyak 872 kelompok lumbung yang terdiri dari tahap pengembangan 619 kelompok dan tahap kemandirian 253 kelompok. Kegiatan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat pada awal target sasaran sebanyak 878 karena ada 4 kelompok lumbung pangan di Provinsi NTB yang tidak layak dilanjutkan, sehingga kelompok tersebut dihemat untuk penghematan BBM Tahun 2013. Realisasi anggaran kegiatan pengembangan lumbung pangan di pusat dan daerah sebesar Rp. 25,51 milyar atau 96,46 persen dari pagu sebesar Rp. 26,45 milyar. Untuk melihat kinerja kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dapat dilihat pada lampiran **tabel 4.3**.

**Tabel 4.3 Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 2013**

KEGIATAN	Output				Anggaran		
	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah gabungan kelompok tani yang diberdayakan (Gapoktan)	Gapoktan	529	484	91,49	36.914.410.000	30.482.262.410	82,58
Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan (Unit)	Unit	868	783	90,21	12.896.087.000	11.287.756.145	87,53
Laporan Kondisi harga pangan pokok (Laporan)	Laporan	33	32	96,97	429.500.000	326.407.400	76,00
Laporan Pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan (Laporan)	Laporan	5	5	100,00	6.015.800.000	4.633.800.468	77,03
Laporan Pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan (Laporan)	Laporan	1	1	100,00	400.000.000	349.307.300	87,33

Selain melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Badan Ketahanan Pangan juga melaksanakan kegiatan berupa analisis harga pangan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan nasional, seperti kebijakan HPP, kebijakan impor komoditas strategis (beras, kedele dan gula), kebijakan percepatan penyaluran raskin, dan percepatan pengadaan cadangan beras nasional.

#### **4.3. PENGEMBANGAN PENEGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN PENINGKATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR**

Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan diarahkan untuk mendorong konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, melalui analisis, koordinasi kebijakan, promosi dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Kegiatan

tersebut terdiri dari 7 sub kegiatan, yaitu: (1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP); (2) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP; (3) Promosi P2KP; (4) Situasi Konsumsi Pangan Penduduk; (5) Koordinasi Keamanan Pangan Segar; (6) Pengembangan Olahan Pangan Lokal; serta (7) Percontohan Fortifikasi Beras.

Beberapa kegiatan utama dalam rangka kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar adalah:

**a. Pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)**

Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan utama yaitu: Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; Pengembangan Pangan Lokal; serta Promosi dan Sosialisasi P2KP.

Pada tahun 2013 jumlah desa P2KP yang diberdayakan sebanyak 6280 desa, terdiri dari 1.280 desa lanjutan tahun 2012 dan 5.000 desa baru tahun 2013. Pada pertengahan tahun 2013 terjadi penghematan anggaran pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan target desa baru yang semula 5.000 desa dikurangi 252 desa sehingga menjadi 4748 desa. Untuk desa lanjutan tahun 2012 mendapatkan bansos sebesar Rp.3.000.000 yang digunakan untuk pengembangan kebun bibit kelompok. Sedangkan desa baru tahun 2013 mendapatkan bansos sebesar Rp. 47.000.000 dengan rincian: (1) Rp. 30.000.000 untuk pengembangan pekarangan anggota; (2) Rp.12.000.000 untuk kebun bibit; (3) Rp. 3.000.000 untuk pengembangan kebun sekolah; dan (4) Rp. 2.000.000 untuk praktek pengembangan menu B2SA di kelompok

Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu desa P2KP ini terdiri dari kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) oleh kelompok wanita, kegiatan pengembangan kebun sekolah oleh salah satu SD/MI yang ada di desa tersebut, serta pendampingan kegiatan oleh pendamping desa. Pada umumnya beberapa

daerah mengalami keterlambatan dalam proses pencairan dana bansos, karena adanya pergantian pejabat/pimpinan di daerah yang begitu cepat. Selain itu, untuk kabupaten/kota yang dananya dekonsentrasi di provinsi, biasanya provinsi menunggu semua kabupaten/kota lengkap dulu semua berkasnya baru diproses. Padahal proses pencairan tersebut dapat dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan dari masing-masing kabupaten/kota. Hal lain juga yang menjadi kendala adalah kondisi alam/geografis lokasi kegiatan yang jauh dari kantor, sehingga butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca untuk melakukan proses pelaksanaan kegiatan.

Apabila dibandingkan dengan kegiatan pada tahun 2012, kegiatan KRPL tahun 2013 dapat terlaksana lebih baik dari realisasi di lapangan karena paket bansos yang diberikan lebih lengkap dengan komponen biaya lebih besar. Namun secara realisasi keuangan kegiatan hingga tahun 2013 hanya dapat terealisasi sebesar 99,8 persen, padahal pada tahun 2012 terealisasi 100 persen. Hal ini dikarenakan pada pertengahan tahun 2013 terjadi kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah sehingga mengurangi jumlah target desa baru tahun 2013 yang seharusnya 5.000 desa menjadi 4748 desa. Sedangkan dari sisi penganggaran, terealisasi sekitar 99,67 persen dari pagu dana yang dialokasikan.

Dari hasil pemantauan dan pembinaan yang dilakukan, kegiatan KRPL ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para kelompok penerima manfaat serta dapat memberikan aspek pemberdayaan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya penghematan pengeluaran rumah tangga untuk belanja sayuran dan buah, karena komoditas tersebut sudah bisa didapat dari hasil pekarangan. Selain itu kelompok wanita penerima manfaat kegiatan KRPL ini juga mengalami penambahan jumlah anggota dikarenakan ketertarikan masyarakat untuk ikut serta merasakan manfaat dari kegiatan ini.

#### **b. Promosi P2KP**

Kegiatan promosi P2KP dilakukan di pusat dan di 33 provinsi. Promosi P2KP ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat melalui upaya-upaya

penyebarluasan informasi, penyadaran sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga demi terciptanya pola hidup yang sehat, aktif dan produktif.

Promosi P2KP dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan seperti gerakan kampanye serta sosialisasi melalui media massa cetak maupun elektronik, promosi pola pangan B2SA seperti “*One day No Rice*”, Lomba Cipta Menu Pangan B2SA, pameran diversifikasi pangan yang fokus pada pengembangan pangan pokok lokal berbasis tepung-tepungan, gerakan kampanye kreatif dan inovatif dalam memperkaya citra pangan lokal, serta melalui pelibatan tokoh formal dan informal yang berpengaruh di masyarakat.

Beberapa kendala yang terjadi dalam kegiatan Promosi P2KP antara lain adalah:

1. Kreasi dan inovasi terhadap materi promosi di daerah belum berkembang, masih mencontoh materi/desain seperti yang di pusat, sehingga perlu dikembangkan lagi dengan menyesuaikan pada dana dan kemampuan masing-masing daerah.
2. Keterbatasan anggaran promosi, sehingga menyebabkan kegiatan promosi dan sosialisasi belum dilakukan secara masif.
3. Kegiatan promosi di daerah kurang terkoordinasi sehingga belum sejalan dengan kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan di pusat.

Capaian hasil promosi P2KP dituangkan dalam laporan yang terdiri dari 33 laporan di provinsi yang terealisasi sebesar 97 persen (31 laporan provinsi).

### **c. Situasi Konsumsi Pangan Penduduk**

Pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan terjangkau oleh seluruh penduduk dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam kerangka pembangunan nasional dan salah satu fokus kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian. Dalam mewujudkan pembangunan ketahanan pangan nasional di era globalisasi dan desentralisasi

di masa mendatang perlu diperhatikan berbagai perkembangan yang terjadi selama ini.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan melalui kondisi/situasi konsumsi pangan masyarakat dilakukan analisis pola konsumsi pangan, karena situasi konsumsi pangan dapat menggambarkan akses masyarakat terhadap pangan, status gizi dan kesejahteraannya, dan biasanya dinyatakan dalam nilai skor mutu pangan atau skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tahun 2015 dapat terwujud apabila perencanaan penyediaan pangan ke depan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Kegiatan situasi konsumsi pangan penduduk merupakan suatu kesatuan dari rangkaian kegiatan untuk mengetahui situasi konsumsi pangan penduduk dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap masyarakat dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yaitu: (1) analisis situasi dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, (2) kajian daftar komposisi bahan makanan, (3) apresiasi pengembangan pola konsumsi pangan, (4) workshop konsumsi pangan berbasis pola pangan harapan dan (5) festival cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman.

Secara umum indikator kinerja kegiatan situasi konsumsi pangan penduduk dituangkan dalam laporan analisis pola konsumsi pangan yang terdiri dari 2 laporan tingkat pusat, 33 laporan tingkat provinsi dan 250 laporan tingkat kabupaten/kota. Pencapaian kinerja tahun 2013 adalah 178 laporan (62,5 persen) yang terdiri dari pusat 100 persen (2 laporan), provinsi 45,5 persen (15 laporan) dan kabupaten/kota 64,4 persen (161 laporan). Anggaran APBN untuk kegiatan Situasi Konsumsi Pangan Penduduk adalah sebesar Rp. 1.862.050.000,- dan terealisasi sebesar 1.638.523.000,- atau 88,0 persen.

Kendala yang dihadapi oleh provinsi dan kabupaten/kota yang belum melaksanakan pemantauan dan mengirimkan laporan analisis pola konsumsi pangan antara lain kurangnya SDM yang melakukan pemantauan konsumsi, terbatasnya pengetahuan dan kemampuan staf untuk melakukan analisis konsumsi pangan penduduk, serta dana yang terbatas.

**d. Koordinasi Keamanan Pangan Segar**

Penerapan praktik-praktik ketidakamanan pangan pada pangan yang beredar berpotensi menimbulkan bahaya kimia, fisika dan biologi. Bahaya kimia dapat muncul antara lain akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, pestisida yang dilarang dan pencemaran logam berat merupakan bahaya kimia. Sementara bahaya biologi dapat ditimbulkan antara lain cemaran mikrobiologi seperti bakteri. Bahaya-bahaya tersebut akan berpotensi muncul termasuk saat pangan beredar di pasaran, sehingga diperlukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kasus-kasus ketidakamanan pangan yang beredar di pasar sebelum dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada prinsipnya keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan segar dan industri makanan serta konsumen. Pemerintah mempunyai peranan dalam pembinaan dan pengawasan kepada produsen dan konsumen tentang keamanan pangan secara nasional dan melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman. Bahkan secara jelas disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas keamanan pangan segar.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Kementerian Pertanian bertanggung jawab dalam penanganan keamanan pangan segar asal pertanian. Namun demikian, penanganan keamanan pangan (khususnya kelembagaan dan pengawasannya) sampai dengan saat ini masih belum optimal dan terkoordinasi dengan baik. Untuk itu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan keamanan pangan segar masih perlu ditingkatkan melalui rapat/pertemuan, penyusunan pedoman teknis, advokasi, sinkronisasi, dan koordinasi lintas sektor. Koordinasi penanganan keamanan pangan segar tersebut sangat

diperlukan untuk memperoleh kesatuan gerak langkah dalam mencapai tujuan bersama dalam rangka mewujudkan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat.

Maksud kegiatan ini adalah untuk mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan kebijakan pusat dan daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan keamanan pangan segar yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penanganan keamanan pangan segar. Selain itu dukungan kegiatan koordinasi keamanan pangan segar, antara lain: (1) Promosi Keamanan Pangan Segar; (2) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar; (3) Bimbingan Teknis Pengawas Keamanan Pangan Segar; (4) Bimbingan Teknis Petugas Pengambil Contoh; (5) Operasional Sistem Manajemen Mutu LSP; (6) Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar; (7) Pengadaan Kendaraan Mobil Pengawas Keamanan Pangan Segar. Berikut ini dapat dilihat target pencapaian realisasi kegiatan seperti **tabel 4.4** dibawah ini.

**Tabel 4.4. Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar Tahun 2013**

No	KEGIATAN	OUTPUT				ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pendampingan P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan)	Desa	4.748	4.748	100,00	253.886.489	253.047.431	99,67
2	Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP	Laporan	531	495	93,20	48.215.781	44.808.339	92,93
3	Laporan Promosi P2KP	Laporan	33	31	93,90	12.759.781	11.988.265	93,95
4	Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Laporan	285	193	67,70	1.862.050	1.638.523	88,00
5	Hasil Koordinasi Keamanan Pangan Segar	Laporan	35	35	100,00	3.656.955	3.408.102	93,19
6	Hasil Sosialisasi/Apresiasi Keamanan Pangan Segar	Laporan	1	1	100,00	81.000	80.731	99,66
7	Hasil Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan	Laporan	1	1	100,00	748.450	645.700	86,27
8	Hasil Pemantauan dan	Laporan	1	1	100,00	240.200	237.298	98,79

No	KEGIATAN	OUTPUT				ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
	Pengawasan Keamanan Pangan							
9	Hasil Percontohan Fortifikasi beras	Laporan	1	1	100,00	3.454.060	213.551	6,18
10	Kendaraan Bermotor/Mobil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Unit	28	27	96,40	7.670.000	5.076.342	66,20
11	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	53	50	94,30	838.110	827.742	98,76
12	Gedung/Bangunan	M2	146	121	82,88	213.610	204.571	95,77

Catatan: Kegiatan pada matriks di atas sesuai form PMK 249/2011

#### 4.4. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan diarahkan untuk mengelola pelayanan kantor dalam rangka pelaksanaan ketahanan pangan serta mengembangkan model-model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat. Pelayanan kantor tersebut berupa: perencanaan, umum, keuangan dan perlengkapan, evaluasi dan pelaporan, serta dukungan manajemen dan administrasi daerah sehingga operasional kantor dan manajemen pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan. Disamping itu, dukungan manajemen dan teknis lainnya diarahkan untuk memfasilitasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pusat dalam menyelenggarakan sidang pleno, konferensi dan sidang regional dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Realisasi kegiatan perencanaan, penganggaran, dan keuangan sudah 100 persen dengan output 34 dokumen, yaitu penyusunan Renja KL dan RKA KL, dan Laporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta SIMAK BMN secara online. Anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh sisa anggaran yang tidak dapat terpakai dari setiap kegiatan. Sedangkan kendala

yang dihadapi dalam perencanaan, penganggaran, dan laporan keuangan tahun 2013, antara lain: (a) Kurangnya sosialisasi dan waktu terbitnya aturan yang singkat tentang revisi anggaran yang disebabkan kebijakan penghematan anggaran untuk subsidi BBM; (b) Perubahan kode akun pada pertengahan tahun anggaran sehingga memerlukan waktu yang lama untuk revisi anggaran; (c) Adanya perubahan pejabat pengelola keuangan yang menyebabkan proses administrasi keuangan menjadi terhambat.

Realisasi kegiatan kepegawaian, organisasi, humas, dan hukum sebesar 100 persen dari target, dengan output yaitu 1 (satu) dokumen kepegawaian, organisasi, hukum dan humas; yang mencakup: (i) dokumen pengelolaan SDM; (ii) bahan perumusan organisasi dan tata laksana; (iii) bahan penyelenggaraan humas dan tata usaha; dan (iv) bahan penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Sementara itu, penyerapan anggaran hanya 65,49 persen dari pagu, yang disebabkan oleh: (1) Kegiatan penyusunan peraturan pemerintah masih banyak yang harus dibahas lebih lanjut dengan lintas kementerian/lembaga terkait; (2) Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan dalam bentuk LPNK sudah selesai dirumuskan, namun masih perlu dikaji kembali ditingkat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Kegiatan Peningkatan kesejahteraan petani kecil (*Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia/SOLID*) dengan pendanaan oleh IFAD dilaksanakan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara pada 11 kabupaten, dengan komponen kegiatan terdiri dari: (1) Pengelolaan usaha tani terpadu dengan pelaksanaan demplot-demplot; (2) Pemberdayaan petani kecil; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan berupa federasi/gapoktan; (4) Dukungan manajemen dan administrasi; serta (5) Pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur. Selain itu, dilaksanakan kegiatan dengan output generik berupa pengadaan kendaraan, komputer dan pembangunan/renovasi gedung/bangunan. Berikut realisasi penyerapan anggaran per jenis kegiatan dapat dilihat pada **tabel 4.5** di bawah ini.

Tabel 4.5. Realisasi Serapan Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013.

No	KEGIATAN	OUTPUT				ANGGARAN (Rp. 000)		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan	Dokumen	34	34	100,00	18.381.126	17.068.046	92,86
2	Hasil pemantauan dan evaluasi program	Laporan	34	34	100,00	8.141.628	7.364.334	90,45
3	Dokumen kepegawaian, organisasi, humas, hokum	Dokumen	3	3	100,00	1.595.000	1.044.603	65,49
4	Sidang pleno, Konferensi dan Sidang Regional ketahanan pangan	Laporan	1	1	100,00	4.991.250	4.652.238	93,21
5	Hasil Usaha tani terpadu	Laporan	14	14	100,00	7.410.350	6.759.950	91,22
6	Pemberdayaan petani kecil	KK	6.930	6.930	100,00	13.809.900	13.414.250	97,13
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Desa	44	44	100,00	6.867.700	6.300.600	91,74
8	Dukungan manajemen dan administrasi	Bulan Layanan	12	12	100,00	33.321.773	23.809.629	71,45
9	Pengelolaan Sumberdaya dan infrastruktur	Unit	64	64	100,00	5.531.600	5.531.400	99,99
10	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	100,00	31.178.940	26.831.236	86,05
11	Kendaraan Bermotor	Unit	51	51	100,00	3.912.820	3.555.506	90,87
12	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	53	53	100,00	838.110	827.742.600	98,76
13	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Unit	146	146	100,00	213.610.000	204.571.750	95,77

Catatan: Kegiatan pada matriks di atas sesuai form PMK 249/2011

Selama tahun 2013, pencapaian kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan, antara lain:

- a. Dari aspek perencanaan kegiatan yang dilakukan adalah penerbitan dokumen perencanaan, seperti: DIPA Badan Ketahanan Pangan, POK, Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran, melakukan sosialisasi dan sinkronisasi persiapan program dan kegiatan tahun 2014, serta melakukan pengregistrasian project bantuan luar negeri.

- b. Pada aspek Evaluasi dan Pelaporan, kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan laporan kinerja Badan Ketahanan Pangan, Laporan Kinerja Sekretariat Badan, Laporan Simonev dan UKP4, Laporan Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan, melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta penyusunan Data dan Statistik Ketahanan Pangan sebagai bahan informasi untuk menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- c. Aspek kepegawaian, hukum, humas dan Dewan Ketahanan Pangan, kegiatan yang telah dilakukan berupa penyusunan dokumen kepegawaian, penyusunan dokumen peraturan terkait dengan ketahanan pangan dan operasional kegiatan di Badan ketahanan Pangan, dokumen kehumasan, serta melakukan sosialisasi peraturan kepegawaian, kehumasan dan sosialisasi Undang-Uundang Pangan serta melaksanakan Sidang pleno, Konferensi dan Sidang Regional ketahanan pangan.
- d. Aspek keuangan dan perlengkapan, kegiatan yang dilakukan berupa penyusunan laporan keuangan dan aset serta laporan pengadaan barang dan jasa serta pemeriharaan gedung.
- e. Aspek Pemberdayaan Petani melalui kegiatan SOLID, kegiatan yang dilakukan berupa pemberdayaan kelompok petani kecil.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Keberhasilan pencapaian pembangunan ketahanan pangan nasional, dipengaruhi pula oleh peran serta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009, dimana instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan Ketahanan Pangan.

**Tabel 5.1 Matriks Dukungan Instansi yang Diharapkan**

No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
1.	Koordinator Bidang Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan</li> <li>• Percepatan penerbitan Inpres Pangkin (Pangan untuk Masyarakat Miskin)</li> </ul>
2	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi dana khusus untuk diversifikasi dan konsumsi pangan</li> <li>• Subsidi untuk daerah rawan pangan</li> </ul>
3	Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan pengawasan penetapan Peraturan pusat dan peraturan daerah terkait program diversifikasi pangan</li> <li>• Dukungan terhadap upaya diversifikasi melalui program Penyediaan Makanan Tambahan – Anak Sekolah (PMT-AS) berbasis Sumberdaya Lokal</li> </ul>
4	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan penataan kerjasama pemasaran</li> <li>• Sosialisasi/ promosi diversifikasi pangan kepada</li> </ul>

No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
		masyarakat
5	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah terutama komoditas pertanian dan peternakan</li><li>• Kebijakan pengembangan industry pengolahan pangan</li></ul>
6	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketersediaan kapasitas, tarif dan kelancaran arus transportasi</li></ul>
7	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan produksi komoditas pertanian di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan</li></ul>
8	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan produksi perikanan</li><li>• Kebijakan penetapan score konsumsi ikan</li><li>• Sosialisasi konsumsi ikan</li><li>• Litbang teknologi budidaya dan pengolahan</li></ul>
9	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan penataan dan pengembangan kelembagaan kelompok usaha tani menjadi kelembagaan koperasi</li></ul>
10	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan cinta pangan lokal dan diversifikasi pangan dalam kurikulum sekolah</li></ul>
11	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan memasyarakatkan konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang</li><li>• Pengawasan produk pangan yang tidak aman dan tidak sehat</li></ul>
12	Riset dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan lahan</li><li>• Pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka diversifikasi pangan</li></ul>
13	Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan memasyarakatkan diversifikasi pangan melalui media</li><li>• Peningkatan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat</li></ul>
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan peningkatan peran perempuan melalui kelompok wanita tani</li></ul>
15	BPOM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan pengawasan produk pangan olahan hasil diversifikasi kelompok tani</li></ul>
16	BMKG	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wacana dan arahan penentuan masa tanam dan jenis tanaman yang cocok di masing-masing daerah</li></ul>

No	Kementerian/ Eselon I	Kebijakan/Kegiatan
17	Ditjen Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi tanaman khusus tanaman pangan selain padi</li> <li>• Sosialisasi/gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu sebagai alternative sumber karbohidrat</li> </ul>
18	Ditjen Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi dan budidaya hortikultura dan bimbingan teknis budi daya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan</li> <li>• Sosialisasi/gerakan konsumsi sayur dan buah-buahan</li> </ul>
19	Ditjen PPHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan produk olahan sebagai bahan pangan pilihan pengganti beras dan terigu</li> </ul>
20	Sekretariat Jenderal-Kemtan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perizinan sarana/prasarana promosi diversifikasi pangan</li> </ul>
21	BPSDMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan bagi aparat, kelompok melalui penyuluh pertanian, serta penyuluhan di pedesaan terkait dengan pola konsumsi yang B2SA</li> <li>• Penurunan konsumsi beras dan peningkatan PPH agar masuk dalam buku pintar penyuluhan</li> </ul>
22	BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi tepat guna dalam optimalisasi pekarangan dan pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan</li> </ul>
23	BPSBP (Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan benih unggul dan bersertifikat baik benih tanaman pangan dan hortikultura</li> </ul>
24	BPPTPH (Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura dalam mengelola pemanfaatan pekarangan</li> </ul>
25	Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian modal usaha melalui kredit usaha atau pinjaman lunak dengan bunga rendah, khususnya pengolahan pangan lokal non beras dan non terigu</li> </ul>
26	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promosi diversifikasi konsumsi pangan melalui media cetak/elektronik, <i>event organizer</i>, dan <i>lain-lain</i></li> </ul>
27	BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan bahan baku yang mendukung usaha pertanian</li> <li>• Promosi diversifikasi pangan</li> </ul>
28	BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adopsi teknologi pengolahan pangan (mesin penepungan, pembuatan mie)</li> </ul>